

**STRATEGI REDAKSI TVRI SUMATERA UTARA  
DALAM MEMPERTAHANKAN NETRALITAS  
PEMBERITAAN PEMILU 2024**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. AGUNG SAFARI HARAHAH**  
**NPM: 1703110017**

**Program Studi Ilmu Komunikasi**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : M. AGUNG SAFARI HARAHAP  
N.P.M : 1703110017  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : STRATEGI REDAKSI TVRI SUMUT DALAM  
MEMPERTAHANKAN NETRALITAS PEMBERITAAN  
PEMILU 2024

Medan, 31 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ROBOT PRIADI S.Sos M.I.Kom

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **M. AGUNG SAFARI HARAHAP**  
N P M : 1703110017  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Pada hari, tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024  
W a k t u : Pukul 08.15 WIB s/d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH SIREGAR, S.Sos, MSP**  
PENGUJI II : **Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom**  
PENGUJI III : **FAIZAL HAMZAH LUBIS S.Sos, M.I.Kom**

(.....)


(.....)

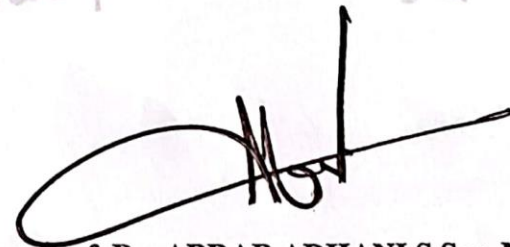
(.....)

**PANITIA PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP  
NIDN : 0030017402

  
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHAN, S.Sos, M.I.Kom  
NIDN: 0111117804





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
100 tahun lebih kami di jalan, selalu akan  
terus dan berkembang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UM/BAH-PT/Ak-K/P/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631053

<https://fkip.umsu.ac.id>

[fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

[f umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

[v umsumedan](#)

## PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya **M. Agung Safari Harahap**, NPM 1703110017, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima

Medan, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan,

M. Agung Safari Harahap

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaminn, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad shalallahualaihiwassalam yang telah membawa kabar tentang ilmu pengetahuan kepada umatnya yang berguna untuk kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul "Strategi Redaksi TVRI Sumatera Utara Dalam Mempertahankan Netralitas Pemberitaan Pemilu 2024", skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dalam proses penyelesaiannya tidak sedikit kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa doa, usaha, bimbingan, dan juga arahan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta .Ayahanda Almarhum Chairul Anwar Harahap dan Ibunda Pamuji Hariaty yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan moral maupun materi, nasehat serta lantunan doa. Sehingga anak mu mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ribut Priadi S.Sos, M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, medidik, mendukung, dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Abrar Adhani S.Sos M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Yurisna Tanjung sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Akhyar Anshori S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Faizal Hamzah Lubis S.I.Kom M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik saya sampai sekarang ini.
10. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu surat menyurat saya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Abangda Nofri Affandi S.I.Kom M.I.Kom selaku senior saya di organisasi HMJ IKO FISIP UMSU maupun dalam bidang profesi Jurnalis yang telah sangat banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

# **Strategi Redaksi Tvri Sumatera Utara Dalam Mempertahankan Netralitas Pemberitaan Pemilu 2024**

**M. Agung Safari Harahap**  
**1703110017**

## **Abstrak**

Sebagai lembaga penyiaran publik sekaligus stasiun televisi yang pertama kali bersiaran di Republik Indonesia. Televisi Republik Indonesia (TVRI) membawa pesan kepentingan publik dalam setiap pemberitaannya. Tak terkecuali dalam pemberitaan politik. Mengambil lokasi penelitian stasiun TVRI Sumatera Utara penulis mencoba meneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi guna menghasilkan simpulan bagaimana strategi TVRI Sumatera Utara dalam mempertahankan netralitas dalam pemberitaan Pemilu 2024. Kontestasi Pemilu 2024 yang banyak menyita perhatian publik tentu memiliki andil besar terhadap pembentukan opini publik yang diakibatkan oleh pemberitaan media massa seperti TVRI Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat disimpulkan TVRI Sumatera Utara dapat mempertahankan netralitasnya dalam pemberitaan Pemilu 2024 . Hal ini berdasarkan dengan redaksi TVRI Sumut yang berulang kali secara serius memperingatkan kepada Kontributor yang bertugas di lapangan untuk memathui segala aturan yang menjadi pedoman peliputan Pemilu 2024 seperti peraturan internal TVRI hingga kode etik jurnalistik yang menekankan netralitas dalam pemberitaan politik terutama Pemilu.

**Kata kunci: TVRI Sumut, Pemberitaan, Pemilu 2024, Kode Etik Jurnalistik**

## **Abstract**

As a public broadcasting institution as well as a television station that first broadcast in the Republic of Indonesia. Television Republik Indonesia (TVRI) carries messages of public interest in every report. This is no exception in political reporting. Taking the research location of TVRI North Sumatra station, the author tried to research using qualitative research methods with interview and observation data collection techniques in order to produce conclusions about TVRI North Sumatra's strategy in maintaining neutrality in reporting on the 2024 Election. The 2024 Election Contestation which has attracted a lot of public attention certainly has a big role on the formation of public opinion caused by mass media coverage such as TVRI North Sumatra. Based on the research results, it can be concluded that TVRI North Sumatra can maintain its neutrality in reporting on the 2024 Election. This is based on the editorial staff of TVRI North Sumatra who have repeatedly seriously warned contributors working in the field to comply with all the rules that guide coverage of the 2024 Election, such as TVRI's internal regulations to the journalistic code of ethics which emphasizes neutrality in reporting on politics, especially the Election.

**Keywords: North Sumatra TVRI, Reporting, 2024 Election, Journalism Code of Ethics**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	8
2.1 Media Massa.....	8
2.1.1 Jenis Media Massa.....	9
2.2 Televisi.....	11
2.2.1 Tujuan Televisi.....	12
2.2.2 Fungsi Televisi.....	12
2.2.3 Isi Media Televisi.....	13
2.3 Televisi Republik Indonesia (TVRI).....	14
2.4 Strategi Redaksi.....	15
2.5. Berita.....	16
2.5.1 Syarat Berita.....	18
2.5.2 Jenis Berita.....	21
2.6 Berita Politik.....	22
2.7 Teori Agenda Setting.....	24

2.8 Teori Tanggung Jawab Sosial.....	26
2.9 Media Penyiaran Publik.....	26
2.10 Netralitas Pemberitaan Politik Dalam Konteks Media Penyiaran Publik.....	29
2.11 Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik.....	33
2.12 Strategi Redaksi Dalam Menjaga Netralitas Pemberitaan.....	35
2.13 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Strategi Redaksi.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Kerangka Konsep.....	41
3.3 Definisi Konsep.....	42
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	43
3.5 Narasumber.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Subjek dan Objek Penelitian.....	45
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.9 Teknik Analisis Data.....	46
3.10 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.11 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Tahap Perencanaan Liputan.....	49
4.1.2 Peraturan Tentang Netralitas Pemberitaan Pemilu TVRI..	50
4.1.3 Strategi Redaksi TVRI Sumut Dalam Mempertahankan Netralitas Pemberitaan.....	54

4.1.4 Pemberitaan TVRI Sumut Berfokus Pada Tahapan Dan Penyelenggara.....	57
4.1.5 Penilaian Netralitas TVRI Sumut Dalam Pemberitaan Pemilu 2024.....	59
4.2 Pembahasan.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1 Simpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Hasil Olahan Penulis (2024).....	42
---	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian Hasil Olahan Peneliti 2024.....	43
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Sebagai media penyiaran publik, Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumatera Utara memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pemberitaan yang netral dan objektif terkait pemilihan umum. Dalam konteks Pemilu 2024, keberadaan TVRI sebagai salah satu media yang diharapkan menjaga netralitasnya dalam pemberitaan politik sangatlah penting. Di tengah era bisnis media yang sangat riskan mempengaruhi redaksi dalam pemberitaan yang membuat banyak media terjebak dalam sebuah pilihan yang disebut sebagai oposan dan partisan, TVRI lewat slogan “media pemersatu bangsa” dituntut untuk dapat menjadi media televisi yang lepas dari berbagai pengaruh agar kepentingan publik dalam menerima informasi secara berimbang dan memiliki nilai-nilai independensi dapat tersalurkan.

Sebagai media yang berperan atas nama negara, TVRI diharuskan memberikan informasi yang menjunjung tinggi netralitas dalam porsi pemberitaan terutama di masa tahun politik 2024. Dalam Pemilu 2024, TVRI tak hanya berfokus pada pertarungan antara para calon legislatif maupun eksekutif di tingkat daerah maupun nasional. Namun TVRI juga harus berfokus pada tahapan pelaksanaan bahkan sejak berbagai persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Effendi Gazali dan Victor Menayang (2003: 41) memberikan definisi penyiaran publik sebagai berikut: Penyiaran publik diartikan sebagai suatu layanan



yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kualitas hidup suatu bangsa, dll. Ini adalah stasiun penyiaran yang misinya adalah menjadi forum diskusi dan klarifikasi hubungan antar negara secara umum dan menjawab kebutuhan masyarakat. Stasiun ini sangat menyadari peran monitoring dan evaluasi oleh masyarakat sebagai penonton dan peserta aktif. Oleh karena itu, penyiaran publik bukanlah siaran yang dikelola negara atau siaran yang hanya mengandalkan hukum pasar.

Menurut Liliweri (2011: 240), strategi merupakan salah satu kunci terpenting bagi suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya serta bertahan dalam ketatnya persaingan dunia bisnis. Kata “strategi” berasal dari kata Yunani “stratogos”, yang secara harafiah berarti “seni total”. Belakangan, istilah tersebut berubah menjadi kata sifat “strategia”, yang berarti keahlian militer, dan baru-baru ini beradaptasi lagi dengan lingkungan bisnis modern. Prinsip netralitas dalam pemberitaan juga diperlukan penerapan strategi redaksi terhadap para reporter atau kontributor di lapangan agar menjaga prinsip tersebut sebelum akhirnya ditayangkan di layar kaca.

Menurut Haryanto, *Etika Pemberitaan Politik Dalam Media Massa Tinjauan Etika Islam* (2008: 22-23) Peristiwa politik juga layak diberitakan, sehingga peristiwa politik hampir selalu menarik perhatian media massa dan masyarakat umum. Pemberitaan politik menjadi sarana komunikasi politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan peristiwa politik. Dalam komunikasi politik, instansi pemerintah, organ partai politik, media individu, media terorganisir, dan organisasi berita merupakan media komunikasi politik yang sangat efektif untuk

menyampaikan pesan-pesan politik. Saat ini, organisasi pemberitaan atau media massa menempati posisi strategis dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada massa secara terorganisir. Politisi yang mencalonkan diri seringkali menggunakan berbagai media massa untuk tujuan persuasi. Bahkan setelah resmi, media massa juga efektif sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat (Nimmo, 1989: 244). Dan sebaliknya, berita politik menjadi media bagi anggota masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan politik baik dukungan maupun kritik kepada pelaku politik. Hal ini karena media massa pada hakikatnya berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog), yakni sebagai anjing penjaga independen atas kekuasaan dan juru bicara kaum tertindas (Kovach, 2006: 143).

Netralitas sering dibicarakan ketika menyangkut cara organisasi media beroperasi. Hal ini terjadi karena rezim pengetahuan dalam kajian jurnalisme menjelaskan bahwa media dan jurnalis harus menjaga jarak dan acuh tak acuh terhadap subjek pemberitaan mereka (Utomo, 2021). Mengutip Kovach dan Rosenstiel (2001), dijelaskan bahwa media harus setia pada kepentingan rakyat atau massa, dan hal ini hanya dapat dicapai dengan berpihak pada media bersama massa itu sendiri. Dalam karya klasiknya tahun 1922, *Opini Publik*, Walter Lippmann menulis bahwa informasi media massa adalah sumber informasi utama yang membentuk pemikiran tentang berbagai isu publik yang berada di luar jangkauan kebanyakan warga negara biasa. Apa yang masyarakat ketahui tentang dunia adalah apa yang media beritakan kepada mereka. Faktanya, dalam bukunya "*Mass Media Agenda Setting in Shaping Public Opinion*," Maxwell Mc Combs berpendapat bahwa agenda dominan media mempunyai pengaruh yang kuat terhadap agenda

dominan publik, yaitu apa yang dianggap penting mengatakan bahwa media mungkin.

Dalam jurnalisme, termasuk idealisme adalah ideologi yang bertujuan memberikan informasi untuk memperkuat masyarakat (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013). Menurut Siregar, jurnalisme dan kegiatan jurnalistik mempunyai prinsip independensi dan netralitas yang harus dijaga. KEJ yang diadopsi Dewan Pers terangkum dengan baik sebagai berikut: Penafsirannya sangat jelas: “Wartawan Indonesia bertindak independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak mempunyai niat jahat.” Prinsip independensi dan netralitas harus dilaksanakan (Pasal 1) sebut harus didukung oleh industri media massa (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013).

Dalam (Muhammad Gafar Yoedjadi, 2017: 276) keberpihakan pada salah satu calon dalam pemilu, akan menempatkan media pada kategori media partisan. (McQuails, 2000) menyatakan bahwa keberpihakan pada media menurunkan kualitas informasi yang dihasilkan dan media yang dikenal masyarakat sebagai media partisan akan kehilangan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Hirst dan Patching (2005) yang menyatakan bahwa media massa adalah institusi sosial dan oleh karena itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Kovach dan Rosenstiel (2006) merumuskan sembilan elemen jurnalisme untuk mengingatkan kita akan peran dan fungsi jurnalisme dalam masyarakat. Pada unsur yang kedua, Kovach dan Rosentiel merumuskan posisi jurnalisme terhadap warga negara, yang menurutnya kesetiaan jurnalisme

terutama kepada rakyat. Artinya jurnalisme tidak boleh mengutamakan kelompok, golongan, etnis, pembaca, atau khalayak mana pun.

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terarah, tidak samar, dan meluas, maka penelitian ini hanya dilakukan pada *Desk Editor* Redaksi TVRI Sumut, Kontributor dan Pengamat Media Massa dalam menjaga netralitas pemberitaan Pemilu 2024 melalui strategi keredaksian TVRI Sumut.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditinjau dan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi redaksi TVRI Sumatera Utara dalam menjaga netralitas pemberitaan Pemilu 2024?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yakni:

- a. Untuk mengetahui strategi redaksi TVRI Sumatera Utara dalam menjaga netralitas pemberitaan Pemilu 2024
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi strategi tersebut.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri pada dua aspek :

- a. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai strategi redaksi media pertelevisian dalam menjaga netralitas pemberitaan terkhusus pada saat masa Pemilihan Umum berlangsung.
- b. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenisnya dan bermanfaat bagi pengelola industri media massa, organisasi profesi jurnalis atau masyarakat di tanah air khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : Uraian Teoritis**

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bab ini menguraikan tentang strategi redaksi media televisi TVRI Sumut, pemberitaan politik, netralitas media dalam pemilu, Teori Agenda Setting, dan etika jurnalistik.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisikan metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian dan deskripsi ringkas objek penelitian.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi redaksi TVRI Sumatera Utara dalam menjaga netralitas pemberitaan Pemilu 2024.

### **BAB V : Penutup**

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran.



## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Media Massa**

Menurut Cangara (2018), media massa adalah suatu alat atau sarana yang melaluinya suatu pesan disampaikan dari suatu sumber kepada penerima atau kelompok sasaran dengan menggunakan alat komunikasi. Dalam teori komunikasi publik, proses komunikasi menyangkut pengiriman dan penerimaan pesan, sehingga media massa berfungsi sebagai penghubung antara pengirim pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan). Media massa menjadi elemen penting dalam komunikasi modern karena berfungsi sebagai media yang melengkapi unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator, pesan, medium (koneksi), komunikator, dan efek.

Media massa mempunyai kualitas atau ciri yaitu mampu menjangkau massa dalam jumlah besar, bersifat publik, dan memberikan popularitas kepada siapa pun atau apa pun yang muncul di media massa, Denis McQuail (2000). Menurut Cangara (2018), media massa juga memiliki ciri-ciri tertentu seperti:

a. Bersifat Melembaga

Bersifat kelembagaan Artinya, entitas yang mengoperasikan media terdiri dari banyak orang yang mengumpulkan, mengelola, dan memberikan informasi.

b. Bersifat Satu Arah

Ini adalah komunikasi satu arah. Artinya komunikasi yang dilakukantidak memungkinkan terjadinya interaksi antara pengirim dan penerima. Jika ada reaksi atau feedback biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

c. Meluas dan Serentak

Kecepatan media massa mampu mengatasi hambatan waktu dan jarak. Mereka melakukan perjalanan secara luas dan bersamaan, dan informasi yang mereka kirimkan diterima oleh banyak orang pada saat yang bersamaan.

d. Terbuka

Artinya siapa pun, di mana pun dapat menerima pesan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau etnis.

e. Menggunakan Peralatan Teknis

Penggunaan Alat Teknis Dalam menyebarkan pesan melalui media massa, biasanya digunakan alat teknis seperti radio, televisi, dan surat kabar.

### **2.1.1 Jenis Media Massa**

Menurut Lahyanto Nadie (2018) dalam Media Massa dan Pasar Modal, media massa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan proses, format, dan teknologi yang digunakan. Jenis Media Massa :

a. Media Cetak

Media Cetak Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak logam. Hasil penemuan ini membuka jalan bagi penyebaran media cetak. Mesin cetak dapat digunakan untuk memproduksi teks secara massal. Sebelum ditemukannya mesin cetak, buku adalah barang mahal yang hanya tersedia bagi bangsawan dan bangsawan. Keberadaan media cetak memungkinkan setiap orang mengakses informasi melalui teks yang diproduksi dalam format seperti surat kabar. Contoh media massa cetak antara lain surat kabar, majalah, buku, dan dokumen teks lainnya.

## b. Media Elektronik

Penemuan radio merupakan tonggak sejarah awal mula media massa elektronik. Stasiun radio pertama didirikan pada tahun 1920-an di Pittsburgh, New York, dan Chicago. Belakangan, radio juga didirikan di negara-negara benua Eropa. Tahun ini, siaran televisi eksperimental dimulai di Amerika Serikat. Contoh media massa elektronik antara lain radio, film, televisi, rekaman audio dan video. Seiring berkembangnya teknologi, media elektronik seperti radio dan televisi pun ikut berkembang. Media televisi menjadi semakin populer karena dapat menampilkan gambar dan suara (audiovisual) secara bersamaan. Berbeda dengan radio yang hanya mendengarkan audionya saja. Menurut Sadiman (2010: 6), Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis unsur yang merangsang belajar di lingkungan siswa. Elektronika kini menjadi alat yang berdasarkan prinsip elektronik. Singkatnya, media elektronik mengacu pada alat media yang menggunakan energi elektromekanis untuk memungkinkan pengguna mengakses konten. Definisi yang lebih sederhana dari media elektronik yakni mencakup segala informasi atau data yang dibuat, didistribusikan, atau diakses dalam bentuk elektronik.

## c. Media Online

Media Online Media online adalah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Prihantoro (2013: 52) meliputi portal, website, radio online, TV online, pers online, dan lain-lain, yang kini banyak dijadikan referensi. Berupa situs berita online. Situs berita atau portal online, sesuai dengan namanya, merupakan media informasi atau gerbang yang menjadikan informasi, berbagai fitur, fitur

online, dan berita tersedia bagi pengguna resmi melalui akses Internet. Media online merupakan media massa yang populer dan khas. Keunikan media online adalah memerlukan jaringan internet untuk mengakses portal web. Keunggulan media online adalah informasinya terkini, real-time dan dapat ditindaklanjuti (Yunus, 2010: 32).

## **2.2 Televisi**

Ilham Z (2010: 225) mendefinisikan televisi sebagai alat untuk menangkap siaran gambar audiovisual dan metode penyaluran video melalui penyiaran. Secara harafiah, televisi juga dapat digambarkan sebagai suatu proses penyiaran yang dapat dilihat dari jarak jauh. Selain radio, televisi merupakan salah satu media pengembangan yang mempunyai karakter audiovisual yang unik. Pencetus utama teknologi televisi adalah Paul Nipkow di Jerman pada tahun 1884. Nipkow menemukan perangkat yang kemudian dikenal sebagai Jantra Nipkow atau Nipkow Shabe.

Penemuan ini melahirkan teleskop listrik atau televisi listrik (Deddy Iskandar Muda, 2005). Televisi mempunyai beberapa keistimewaan yang menarik dibandingkan media massa lainnya. Menurut Wahtudi, “Karena televisi merupakan media audiovisual yang hidup, maka gerak dan gerak/drama diutamakan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa gambar yang ditampilkan di televisi harus merupakan perpaduan antara seni, gerak, dan teknologi. Suyanto B (Majalah Republika, 2016 ). Televisi adalah suatu sistem elektronik yang mentransmisikan gambar diam dan gambar hidup beserta suara melalui kabel (Arsyad, 2002: 50). Adapun tujuan dan fungsi televisi sebagai berikut:

### **2.2.1 Tujuan televisi**

Tujuan Televisi Menurut Effendi (2003: 177), berbeda dengan radio, televisi mempunyai unsur visual berupa video langsung, sehingga mempunyai daya tarik yang kuat dan dapat meninggalkan pesan dan kesan yang mendalam bagi pemirsanya.

### **2.2.2 Fungsi televisi**

Menurut pakar komunikasi Harold D. Laswell, televisi mempunyai tiga fungsi yang masing-masing tidak berdiri sendiri melainkan saling mendukung, antara lain:

- a. Sebagai pemerhati lingkungan hidup, media massa senantiasa memberikan berbagai informasi yang tidak tersedia bagi masyarakat umum.
- b. Fakta bahwa media massa adalah penjaga gerbang berarti lebih menekankan pada seleksi, evaluasi, dan interpretasi terhadap apa yang harus disampaikan kepada publik.
- c. Media massa berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dapat juga disebut sebagai media pendidikan.

Menurut Laswell, selain fungsi televisi, dalam buku Onon Uchajna Effendi berjudul *Dinamika Komunikasi*, televisi publik pada umumnya menayangkan acara-acara, namun fungsi utamanya tetap hiburan. Merupakan suplemen yang diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan alami manusia (Luluk, 2011). Selain itu pengertian televisi juga dirumuskan oleh Onong U. Effendy (1989: 24) sebagai berikut: "Tele" dan "Vizio". Tele artinya jauh dan Visio artinya penglihatan.

Oleh karena itu, menurut kata aslinya, pengertian televisi adalah: "Penglihatan jarak jauh. Dan menurut ilmu komunikasi, istilah televisi mengacu pada transmisi dan penerimaan hasil visual dari benda bergerak melalui gelombang radio elektromagnetik.

### **2.2.3 Isi Media Televisi**

Media televisi, seperti halnya media massa lainnya, berfungsi sebagai alat strategis untuk informasi, hiburan, kontrol sosial, dan hubungan masyarakat. Seiring berjalannya proses penyampaian isi pesan media televisi kepada pemirsa, isi pesan juga dimaknai berbeda-beda tergantung pada visi pemirsa dan pengaruh sangat luas. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa mengenai isi pesan program televisi sangat erat kaitannya dengan situasi sosial ekonomi serta situasi dan kondisi pemirsa yang menonton televisi.

Oleh karena itu, televisi beranggapan bahwa suatu peristiwa penting untuk disajikan kepada pemirsanya, namun belum tentu penting bagi pemirsanya. Ada tiga dampak program televisi terhadap pemirsanya, yakni:

- a. Pengaruh kognitif adalah kemampuan seseorang atau pemirsa dalam menyerap dan memahami acara yang disiarkan di televisi sehingga memberikan pengetahuan kepada pemirsa.
- b. Efek peniruan adalah pemirsa dihadapkan pada tren aktual yang disiarkan di televisi.
- c. Pengaruh perilaku merupakan proses penanaman nilai-nilai sosiokultural yang ditayangkan dalam program televisi dan diterapkan dalam kehidupan pemirsa sehari-hari.



Konten media adalah program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemirsa dan menarik perhatian mereka, mulai dari kebutuhan informasi hingga hiburan. Penggunaan media massa dapat memiliki banyak arti, ketika konten media tertentu dikonsumsi dalam kondisi tertentu untuk memenuhi fungsi tertentu dan disertai dengan harapan tertentu yang harus dipenuhi, dan kebutuhan didefinisikan sebagai penggunaan media.

### **2.3 Televisi Republik Indonesia (TVRI)**

TVRI merupakan lembaga penyiaran publik nasional yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai Media Informasi dan Hiburan bagi Masyarakat. TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962 dengan menggunakan sistem siaran analog, dan kini telah beralih ke siaran digital. TVRI, televisi nasional, menjangkau 33 saluran daerah di Indonesia dan didukung 361 siaran sehingga mampu menjangkau pelosok-pelosok. Selain melalui televisi tradisional yang pemirsanya dapat menonton dalam satu layar, TVRI juga dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI KLIK, siaran streaming, YouTube, dan media sosial lainnya.

Pemirsa akan menyaksikan beragam program siaran, baik secara langsung maupun berulang-ulang di setiap wilayah, dalam rentang waktu 20 jam siaran nasional dan 4 jam siaran regional. Organisasi penyiaran publik TVRI mempunyai kewenangan untuk melakukan siaran di stasiun penyiaran daerah manapun untuk mendukung isu-isu yang berkaitan dengan pemajuan dan pengembangan potensi kekayaan alam, budaya, dan sosial, pembangunan infrastruktur, dan penguatan

pembangunan daerah Selesai. TVRI Sumut berkantor di salah satunya, Jalan Putri Hijau Medan.

#### **2.4 Strategi Redaksi**

Menurut Hitt (2001: 12), strategi redaksi adalah metode yang digunakan media untuk mencapai tujuan akhirnya. Strategi yang digunakan oleh tim redaksi adalah rencana yang menghubungkan seluruh bagian perusahaan, menyeluruh, mencakup seluruh elemen penting perusahaan, dan seluruh bagian rencana tersebut terintegrasi secara harmonis satu sama lain. Perencana strategis biasanya memegang posisi tertinggi di perusahaan karena mereka fokus pada keterampilan konseptual daripada keterampilan teknis. Oleh karena itu, strategi editorial harus dilakukan oleh setiap orang yang bertugas menyajikan berita dalam suatu organisasi editorial agar berita dapat berkembang dan bertahan dalam persaingan yang ketat dengan publik lainnya.

Menurut Liliweri (2011: 240), strategi merupakan salah satu kunci terpenting bagi suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya serta bertahan dalam ketatnya persaingan dunia bisnis. Kata “strategi” berasal dari kata Yunani “stratogos”, yang secara harafiah berarti “seni total”. Belakangan, istilah tersebut berubah menjadi kata sifat "strategia", yang berarti keahlian militer, dan baru-baru ini beradaptasi lagi dengan lingkungan bisnis modern. Kata stratogos berarti ".

- a. Keputusan untuk melakukan suatu tindakan dalam jangka panjang dengan segala akibatnya.
- b. Penentuan tingkat kerentanan posisi kita dengan posisi para pesaing (ilmu perang dan bisnis).

- c. Pemanfaatan sumber daya dan penyebaran informasi yang relatif terbatas terhadap kemungkinan penyadapan informasi dan topografis.
- d. Penggunaan fasilitas komunikasi untuk penyebaran informasi yang menguntungkan berdasarkan analisis geografi dan topografis.
- e. Penemuan titik-titik keamanan dan perbedaan penggunaan sumber daya dalam pasar informasi.

Jadi, berdasarkan dari teori tentang strategi, maka pengertian strategi adalah suatu proses perencanaan yang dilakukan untuk meraih sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan memikirkan dan menggunakan segala aspek penting sebelum melakukan tindakan yang ingin dilakukan. Strategi bukan hanya tentang sebuah perencanaan untuk meraih tujuan semata saja melainkan juga untuk dapat bertahan dari persaingan bisnis yang sengit.

## **2.5 Berita**

Paul de Massenner, dalam bukunya *Here's The News: Unesco Associate*, menyatakan bahwa berita merupakan informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak yang mendengarkannya. Charnley dan James M. Neal menyatakan bahwa berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, pendapat, kecenderungan, keadaan, situasi, atau penafsiran yang penting, menarik, dan baru serta perlu dikomunikasikan kepada masyarakat sesegera mungkin (Erol Jonathans, Mirza, 2000: 68-69). Doug Newsom dan James A. Wallert, dalam *Media Writing: News for the Mass Media* (1985: 11) memberikan definisi sederhana: berita adalah informasi yang diketahui oleh masyarakat, atau lebih umum lagi, masyarakat untuk mengetahui. Dengan memberitakan berita, media massa menyampaikan apa yang

dibutuhkan masyarakat. Definisi lain yang disusun oleh Assegaff (1983: 23-24) diharapkan dapat membantu kita lebih memahami dan memahami berita. Misalnya, Dean M. Lyle Spencer mengatakan dalam *News Writing* bahwa berita adalah kenyataan atau gagasan nyata yang dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Dalam *Reporting* (1965), Michael V. Charnley menekankan bahwa berita adalah sumber fakta dan opini paling awal yang menarik, penting, atau keduanya bagi sebagian besar masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut perlu ditengahkan, karena definisi berita yang disajikan para pakar lebih banyak bertitik tolak dari dunia surat kabar. Kenyataan tersebut tidak salah hanya saja tidak lengkap karena media massa tidak hanya menunjuk kepada surat kabar, tetapi juga mencakup radio, televisi, film, dan bahkan juga internet. Dengan kata lain berita bukan hanya menunjuk pada pers atau media massa dalam arti sempit dan “tradisional” melainkan juga pada radio, televisi, film, dan internet atau media massa dalam arti luas dan modern. Berita pada awalnya memang hanya “milik” surat kabar. Tetapi sekarang berita juga telah menjadi “darah-daging” radio, televisi, dan internet. Tak ada media tanpa berita, sebagaimana halnya tak ada berita tanpa media. Berita telah tampil sebagai kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat modern di seluruh dunia, (A.S Haris Sumadiria, 2005: 64-65).

#### a. Penyuntingan Berita

Editing dalam media televisi adalah proses menghubungkan, menambah, dan mengurangi naskah dan hasil syuting, baik di lokasi maupun di studio, sehingga hasilnya berupa hubungan dan urutan yang

dapat dinikmati dan dipahami oleh pemirsa televisi sebelum melakukan pengeditan. Pekerjaan selesai, reporter dan juru kamera diutus untuk mencari berita, baik soft news maupun hard news (Sari, 24:2014).

### **2.5.1 Syarat Berita**

Secara umum berita memiliki syarat nilai berita atau *News Value* yang merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis yakni para reporter dan editor untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Berdasarkan buku Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (2002) karya Eriyanto, nilai berita memberikan standar dan ukuran yang dapat dijadikan standar oleh jurnalis dalam praktik kerja jurnalistiknya. Dengan demikian, nilai berita dapat dikatakan sebagai tolok ukur atau ukuran yang digunakan jurnalis dalam melakukan pekerjaan pemberitaan, yaitu proses produksi berita. Kelayakan berita adalah faktor dan kriteria yang menjadi tolak ukur suatu fakta yang layak diberitakan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Diantaranya syarat-syarat berita yakni sebagai berikut:

a. Keluarbiasaan (*Unusualness*)

Berita adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam pandangan jurnalistik berita bukanlah suatu peristiwa biasa. Berita adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Di dunia ini begitu banyak peristiwa yang masuk kategori luar biasa seperti pesawat terbang meledak di udara, kebakaran yang melahap ratusan rumah di suatu permukiman, gunung meletus yang menyebabkan puluhan

ribu jiwa harus mengungsi atau kapal tenggelam yang menelan korban ratusan penumpang tewas. Peristiwa-peristiwa seperti itu selalu mendapat tempat utama dalam dunia jurnalistik karena menimbulkan dampak besar bagi kehidupan.

b. Kebaruan (*Newsness*)

Berita adalah semua apa yang terbaru. Contohnya adalah Kamis hari ini bukanlah kamis sebelumnya. Nama hari yang selalu diulang namun peristiwa atau perubahan yang terjadi pada setiap hari Kamis tidak pernah sama. Selalu muncul perubahan baru, peristiwa baru, dan kecenderungan baru.

c. Aktual (*Timeliness*)

Berita adalah peristiwa yang sedang atau baru saja terjadi. Secara sederhana actual berarti menunjuk pada peristiwa yang baru atau yang sedang terjadi. Menurut (A.S Haris Sumadiria, 2005: 82-83) dalam memperoleh dan menyajikan berita-berita atau laporan peristiwa yang aktual ini media massa mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya mulai dari wartawan sampai kepada daya dukung peralatan paling modern dan canggih untuk menjangkau narasumber dan melaporkannya pada masyarakat seluas dan secepat mungkin. Informasi yang disebarluaskan masih sangat baru. Semakin baru peristiwa tersebut, maka berita tersebut akan semakin menarik bagi pemirsa. Ada tiga kategori nilai berita aktual:

1) Aktual kalender



Jadi Kalender terbaru yaitu terjadinya hari-hari penting nasional. Misalnya tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia.

2) Aktual waktu

Waktu sebenarnya (termasuk penetapan hari raya Idul Fitri dan penghitungan pemilu).

3) Aktual masalah

Masalah sebenarnya adalah kelayakan berita dari peristiwa-peristiwa terkini.

4) Akibat (*Impact*)

Berita adalah segala sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Contohnya kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif angkutan umum, tarif telepon, bunga kredit pemilikan rumah, dan lainnya. Apa saja yang menimbulkan akibat sangat berarti di masyarakat itulah berita. Dalam (A.S Haris Sumadiria, 2005: 82-83) dampak suatu pemberitaan bergantung pada beberapa hal: seberapa banyak khalayak yang terpengaruh, pemberitaan itu langsung mengena kepada khalayak atau tidak, dan segera tidaknya efek berita itu menyentuh khalayak media surat kabar, radio, atau televisi yang melaporkannya.

5) Dekat

Informasi yang memiliki nilai kedekatan emosi dan geografis dengan khalayak perlu segera dilaporkan. Makin dekat suatu lokasi peristiwa

dengan khalayak informasinya akan semakin disukai oleh khalayak, (A. Musman & Nadi Mulyadi, 2017: 115).

### **2.5.2 Jenis Berita**

Menurut Asep Syamsul (2009), ada beberapa jenis berita dalam dunia jurnalistik yang dikelompokkan menjadi lima jenis berita, antara lain:

- a. Straight news: Berita jelas apa adanya, ditulis ringkas, berita langsung. Sebagian besar halaman surat kabar dan berita utama (headline) adalah jenis ini.
- b. Depth news: Berita mendalam yang dibuat dengan menyelidiki apa yang ada di bawah permukaan yang juga menuntut wartawan untuk mengulas sebab dari berita tersebut.
- c. Investigation news: Berita yang dibuat berdasarkan riset atau penelitian dari berbagai sumber berupa wawancara narasumber hingga pengolahan data yang terkait dengan berita tersebut.
- d. Interpretatif news: Berita yang dibuat berdasarkan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. Biasanya sering terdapat pada berita olahraga.
- e. Opinion news: Berita tentang opini pribadi. Biasanya pendapat seorang sarjana, peneliti, ahli, atau pejabat mengenai suatu masalah, peristiwa, dan lain-lain.

### **2.6 Berita Politik**

Menurut Haryanto, Etika Pemberitaan Politik Dalam Media Massa Tinjauan Etika Islam (2008: 22-23) Peristiwa politik juga layak diberitakan, sehingga

peristiwa politik hampir selalu menarik perhatian media massa dan masyarakat umum. Menurut Hamad (2004: 1), hal ini disebabkan adanya dua faktor yang saling berkaitan. Pertama, politik saat ini adalah era mediasi (politik di era mediasi), dengan kata lain pertukaran politik antar elit politik dan khalayak membutuhkan media massa sebagai perantara yang mempertemukan klaim-klaim masing-masing partai politik. Kedua, peristiwa-peristiwa politik, baik berupa tindakan maupun pernyataan para aktor politik, biasanya selalu layak diberitakan, meskipun hanya sekadar peristiwa politik rutin. Berita politik pada dasarnya sama dengan berita lainnya dari segi pengumpulan data dan teknik penulisannya. Namun, berita politik memiliki dimensi strategis dibandingkan berita topik lainnya.

Pemberitaan politik menjadi sarana komunikasi politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan peristiwa politik. Dalam komunikasi politik, instansi pemerintah, organ partai politik, media individu, media terorganisir, dan organisasi berita merupakan media komunikasi politik yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Saat ini, organisasi pemberitaan atau media massa menempati posisi strategis dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada massa secara terorganisir. Politisi yang mencalonkan diri seringkali menggunakan berbagai media massa untuk tujuan persuasi. Bahkan setelah resmi, media massa juga efektif sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat (Nimmo, 1989: 244). Dan sebaliknya, berita politik menjadi media bagi anggota masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan politik baik dukungan maupun kritik kepada pelaku politik. Hal ini karena media massa pada hakikatnya berfungsi sebagai anjing

penjaga (watchdog), yakni sebagai anjing penjaga independen atas kekuasaan dan juru bicara kaum tertindas (Kovach, 2006: 143).

Berita politik, seperti halnya media komunikasi politik lainnya, bertujuan untuk membentuk opini publik dan menyampaikan sikap khalayak terhadap isu-isu politik, dengan aktor komunikatifnya, baik politisi maupun jurnalis. Untuk membentuk opini publik, laporan dilakukan secara bersamaan di tiga bidang tindakan. Penerapan strategi pengemasan pesan (strategi framing). Implementasi agenda media (fungsi agenda setting). Karena berita politik berkaitan dengan pembentukan opini, simbol-simbol politik digunakan untuk mencocokkan opini yang dikembangkan. Demikian pula, strategi pengemasan berita melibatkan pemilihan fakta yang mendukung opini. Fungsi agenda setting media kini menjadi faktor penting dalam membentuk opini publik di masyarakat. (Hamad, 2004: 4) Upaya untuk membentuk opini publik ini secara otomatis dapat menyebabkan pemberitaan politik menjadi bias terhadap realitas.

Realitas yang dihadirkan oleh media sudah merupakan realitas yang terkonstruksi, atau realitas yang terkonstruksi dan dalam dapur redaksi terdapat elemen media seperti pemilik media (organisasi medianya sendiri), jurnalis (profesi atau ) yang tercipta atas instruksi internal dari jaringan. (diisi dengan artefak), konteks sosial, politik dan budaya (masyarakat), dan penonton ( penonton) (McQuail, 1989: 159).

## **2.7 Teori Agenda Setting**

Secara etimologis, konsep agenda setting dapat dipahami sebagai penetapan atau penyusunan suatu agenda/acara/kegiatan. Hal ini sejalan dengan agenda dan

kondisi beberapa pakar komunikasi Indonesia. Penetapan Agenda Menurut McCombs dan Shaw, “media massa memiliki kemampuan untuk memindahkan agenda berita ke dalam agenda publik” (Griffin, 2010). Pemahaman ini menjelaskan bahwa media massa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pemikiran orang-orang yang terpapar informasi. Lebih lanjut McCombs dan Shaw menjelaskan bahwa media mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat memutuskan sesuatu yang penting berdasarkan apa yang diberitakan media. Dengan kata lain, kami menghargai apa yang dianggap penting oleh media. Kedua peneliti juga menekankan bahwa hal ini tidak berarti saling menyalahkan. Media selalu secara sadar mempengaruhi masyarakat dan mengejar tujuan tertentu melalui informasi dan berita yang disampaikan melalui media.

Teori agenda setting merupakan teori yang menyatakan bahwa media merupakan pusat penegakan kebenaran yang dapat mengangkat dua unsur yaitu kesadaran dan pengetahuan ke dalam agenda publik. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik perhatian terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh media. Apa yang disampaikan media massa tentunya berdasarkan kaidah jurnalistik yang berlaku. Apalagi media massa memiliki jurnalis yang mengolah dan menyampaikan informasi sesuai prinsip jurnalistik. Namun, dalam kasus ini, McCombs dan Shaw mengatakan liputan media dianggap penting dan harus dipertimbangkan oleh masyarakat luas. Media mempengaruhi pikiran masyarakat bukan dengan memberi tahu mereka apa yang harus dipikirkan atau ide dan nilai apa yang harus mereka miliki, tetapi dengan memberi tahu mereka isu dan topik apa yang akan saya berikan.

Masyarakat umum cenderung menilai apa yang diberitakan di media massa benar-benar layak untuk diketahui dan dipublikasikan oleh masyarakat. Menurut Bernard C. Cohen, teori penetapan agenda menyatakan bahwa media merupakan pusat pencarian fakta, dan bahwa dengan meningkatkan kesadaran dan perhatian publik, media berkontribusi pada peran ganda yaitu kesadaran dan pengetahuan tentang agenda publik teorinya adalah bahwa elemen dapat ditingkatkan. Mengatasi isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Ia berargumentasi bahwa "meskipun jurnalisme sampai saat ini gagal menarik orang-orang yang berpikir, jurnalisme telah berhasil menarik pemirsa ke dalam pemikiran mereka" (Baran dan Dennis, 2007: 13). Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss berpendapat bahwa: Teori penetapan agenda adalah teori bahwa media menciptakan gambaran dan topik penting dalam pikiran kita. Sebab, media harus selektif dalam memberitakan. Lembaga penyiaran berita bertindak sebagai penjaga informasi, memutuskan apadan bagaimana melaporkannya.

Syukur Kholil mengutip Samsudin A. Rahim bahwa peran medialah yang menentukan agenda dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat dengan menetapkan agenda pada hal-hal yang dianggap penting (Kholil, 2007: 36). Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa teori agenda setting bertujuan untuk menjelaskan peran kunci media massa dalam menetapkan agenda masyarakat yang terpapar informasi. Karena masyarakat sudah terbiasa menerima berita dari media massa, maka berita ini menjadi topik komunikasi sehari-hari. Berita dan informasi yang disampaikan melalui media

massa bukan sekedar pengetahuan dan informasi bagi masyarakat, bahkan dapat mengubah gaya hidup, perilaku, dan sikap masyarakat.

## **2.8 Teori Tanggung Jawab Sosial**

McQuail (2012) merangkum lima proporsi utama dalam teori tanggung jawab sosial.

- a. Pertama, media bertanggung jawab terhadap publik dan publik memiliki kepercayaan terhadap kepemilikan media.
- b. Kedua, media yang membuat berita harus mampu menyajikan berita yang jujur, akurat, berimbang, objektif, serta relevan.
- c. Ketiga, media bebas dalam mengatur dirinya sendiri.
- d. Keempat, media senantiasa berpegang teguh pada kode etik dan profesionalitas.
- e. Kelima, campur tangan pemerintah mungkin diperlukan dalam kondisi tertentu untuk mengamankan kepentingan publik.

## **2.9 Media Penyiaran Publik**

Media Komunikasi Televisi merupakan salah satu alat komunikasi yang dalam perkembangannya sudah menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di era informasi saat ini, (Audiovisual) karena kelebihan dan aktualitasnya sebagai media tontonan, televisi menjadi media favorit keluarga. Akibat globalisasi industri media, industri televisi telah menjadi industri padat modal yang dikelola dengan bantuan teknologi maju.

Sepanjang sejarahnya, industri televisi setiap negara telah mengembangkan karakteristik dan perkembangannya masing-masing di setiap tahapannya. Dana

yang diinvestasikan pada operasional televisi jauh lebih mahal dibandingkan dana yang diinvestasikan pada media cetak atau operasional penyiaran. Persaingan antar saluran televisi juga semakin ketat, baik dalam hal perolehan iklan, jumlah penonton, maupun persaingan untuk mendapatkan program impor dan lokal terbaik (Kurniati dalam Sudibyo, 2004: -54).

Effendi Gazali dan Victor Menayang (2003: 41) memberikan definisi penyiaran publik sebagai berikut: Penyiaran publik diartikan sebagai suatu layanan yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kualitas hidup suatu bangsa, dll. Ini adalah stasiun penyiaran yang misinya adalah menjadi forum diskusi dan klarifikasi hubungan antar negara secara umum dan menjawab kebutuhan masyarakat. Stasiun ini sangat menyadari peran monitoring dan evaluasi oleh masyarakat sebagai penonton dan peserta aktif. Oleh karena itu, penyiaran publik bukanlah siaran yang dikelola negara atau siaran yang hanya mengandalkan hukum pasar.

Berdasarkan ciri-ciri definisi di atas, keberadaan lembaga penyiaran publik mempunyai empat implikasi utama:

a. Akses publik

Akses Publik Stasiun penyiaran publik aktif mendirikan stasiun dan mengudara bahkan di daerah yang tidak ingin dikunjungi masyarakat. Alternatifnya, karena tidak ada prospek keuntungan ekonomi, kawasan tersebut menjadi kawasan penyiaran komersial.



b. Dana publik

Pendanaan publik Penyiaran publik terutama didukung oleh pendanaan publik. Misalnya melalui dana masyarakat yang dikendalikan pemerintah seperti APBN/APBD. Pendanaan publik juga berasal dari berbagai kegiatan penggalangan dana (fundraiser) yang dilakukan lembaga penyiaran publik bersama-sama dengan masyarakat. Hal ini termasuk memanfaatkan peluang pemrograman dan penyiaran, seperti program periklanan dan sponsorship. Namun, hal ini asalkan ada beberapa aktivitas pada tingkat makro standar periklanan dan sponsorship, etika publikasinya, atau pendapatan dan pengeluaran yang harus diawasi oleh publik. Akuntabilitas publik diikuti.

c. Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik memiliki dua hal pokok. Pertama, lembaga penyiaran publik harus mempertanggungjawabkan seluruh programnya sesuai dengan standar moral dan nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya (moral accountability). Kedua, pemerintah harus memberikan laporan kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan proses penggunaan dana (akuntabilitas keuangan).

d. Keterlibatan publik

Partisipasi masyarakat pada penyiaran publik harus bekerja sama dan mengundang partisipasi masyarakat seluas-luasnya, khususnya melalui regulator penyiaran publik pada tingkat yang relevan dengan keberadaan entitas tersebut (misalnya di tingkat nasional atau daerah) diharapkan bisa disambut dengan baik. Pasal 32 Pasal 14 Ayat 1 UU tersebut mengatur

bahwa penyiaran publik “berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi kepentingan umum sebuah stasiun penyiaran.

## **2.10 Netralitas Pemberitaan Politik Dalam Konteks Media Penyiaran Publik**

Netralitas sering dibicarakan ketika menyangkut cara organisasi media beroperasi. Hal ini terjadi karena rezim pengetahuan dalam kajian jurnalisme menjelaskan bahwa media dan jurnalis harus menjaga jarak dan acuh tak acuh terhadap subjek pemberitaan mereka (Utomo, 2021). Dalam hal ini, netralitas menjadi standar ideal bagi pers yang harus memberikan ruang yang setara (tanpa nilai) kepada pihak-pihak yang diberitakan, tanpa memberikan interpretasi. Namun netralitas sepertinya hanya mitos belaka. Faktanya, konsep netralitas sedikit banyak bermasalah secara budaya dan struktural dalam organisasi media. Shoemaker dan Reese (1996) menjelaskan bahwa produk liputan media dipengaruhi oleh setidaknya dua tingkat hierarki. Pertama, individu yang mencakup unsur latar belakang dan karakteristik sebagai seorang profesional media (nilai-nilai pribadi sebagai jurnalis). Kedua, praktik sehari-hari yang mencakup kehidupan sehari-hari para profesional media dalam pemikiran kelompok media (pengaruh ruang redaksi). Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, netralitas budaya media tidak dapat dicapai.

Tapi bukan itu saja. Chomsky dan Herman (1988) bahkan menyatakan bahwa media tidak mungkin netral. Dalam konteks ini, media beroperasi melalui setidaknya empat filter. Pertama, kepemilikan media, yaitu kepemilikan media,

biasanya dimiliki berdasarkan kepentingan konglomerat dan kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu. Kedua, dana periklanan, yaitu pengiklan media. Dana ini digunakan untuk mendanai organisasi media dan pemasaran pengiklan itu sendiri. Ketiga, elit media yaitu elit media yang mengontrol editorial atau pemberitaan dari sumber tertentu. Keempat, *Flack and the enforcers* yakni ancaman dan aturan khusus yang dikenakan kepada jurnalis saat memberitakan. Karena keempat hal tersebut, tidak ada netralitas struktural dalam media. Keyakinan bahwa media harus netral sudah tidak relevan lagi.

Padahal, media seharusnya mengambil sikap atau lebih tepatnya memihak. Dalam konteks ini, keberpihakan tidak serta merta membuat media atau jurnalis melanggar prinsip dan etika jurnalistik yang ada. Namun keberpihakan di sini dimaknai sebagai independensi media dan jurnalis, yaitu ketaatan pada nilai-nilai tertentu tanpa menghiraukan intervensi partai politik terhadap suatu isu. Independensi ini harus didasarkan pada fakta dan data yang sebenarnya yang diperoleh melalui berbagai cara seperti observasi, penelusuran dokumen, dan wawancara. Dengan menggunakan metode ini, jurnalis pasti bisa menemukan kebenaran dan membuat media berpihak pada mereka. Hal ini dapat menjadi hal yang positif karena media dapat menjadi kompas moral bagi masyarakat (Utomo, 2021). Selain itu, media juga dapat secara aktif memenuhi kewajiban jurnalistiknya. Mengutip Kovach dan Rosenstiel (2001), dijelaskan bahwa media harus setia pada kepentingan rakyat atau massa, dan hal ini hanya dapat dicapai dengan berpihak pada media bersama massa itu sendiri.

Dalam karya klasiknya tahun 1922, *Opini Publik*, Walter Lippmann menulis bahwa informasi media massa adalah sumber informasi utama yang membentuk pemikiran tentang berbagai isu publik yang berada di luar jangkauan kebanyakan warga negara biasa. Apa yang masyarakat ketahui tentang dunia adalah apa yang media beritakan kepada mereka. Faktanya, dalam bukunya "*Mass Media Agenda Setting in Shaping Public Opinion*," Maxwell McCombs berpendapat bahwa agenda dominan media mempunyai pengaruh yang kuat terhadap agenda dominan publik, yaitu apa yang dianggap penting mengatakan bahwa media mungkin.

Hal-hal yang penting bagi masyarakat. Paparan informasi politik tertentu yang diberikan media massa kepada masyarakat secara terus-menerus diyakini dapat mempengaruhi opini masyarakat mengenai situasi politik. Tidak peduli apakah pendapat itu positif atau negatif. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan fungsi partai politik secara signifikan juga disebabkan oleh masih banyaknya pemberitaan media massa (Hasan, Kamaruddin, 2014:2).

Netralitas industri media massa terutama ditentukan oleh faktor ekonomi dan politik. Kajian ekonomi politik media diperkenalkan oleh Vincent Moscow dalam bukunya *The Political Economy of Communication* (1998). Pada dasarnya, hal ini didasarkan pada pemahaman ekonomi politik sebagai studi tentang hubungan sosial dan kekuasaan baik dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Sumber dayanya meliputi media cetak, media elektronik, buku, kaset, film, dan internet (Moscow, 1998: 25). Fokusnya adalah pada kepemilikan, kendali, dan kekuasaan operasional di industri pasar media. Industri media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem politik.

Protagonisnya adalah produksi media, yang ditentukan oleh: pertukaran nilai berbagai jenis konten media dalam kondisi tekanan ekspansi pasar, dan oleh kepentingan politik dan ekonomi pemilik modal dan pembuat kebijakan media (Gurnham, Mcquail, 2000: 82).

Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan baik secara vertikal maupun horizontal, akibat kecenderungan monopoli dan proses integrasi. Perkembangan industri media massa di Indonesia hanya dikendalikan oleh sejumlah besar pemilik modal yang terkonsentrasi, sehingga mengakibatkan oligopoli media, atau monopoli kepemilikan media. Banyak sekali media di Indonesia yang seolah-olah hanya dikuasai oleh 13 konglomerat media besar. Fakta ini juga menunjukkan secara global bahwa industri media massa global hanya didominasi oleh enam perusahaan media massa milik Yahudi. Dikatakan bahwa media mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat, dan kemungkinan besar akan mempengaruhi politik, ekonomi, sistem sosial, dan bahkan isu-isu demokratisasi dan budaya.

Bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara media yang menghasilkan sistem nilai tertentu dengan proses pemaknaan dalam kehidupan politik publik. Jürgen Habermas (1989) mengemukakan bahwa media merupakan ruang yang dapat berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, dalam hal ini jembatan komunikasi antara negara dan rakyat. Namun hal tersebut Jurnalisme adalah pengertian kegiatan jurnalistik yang melibatkan pencarian, pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi melalui penggunaan media.

### **2.11 Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Politik**

Dalam jurnalisme, termasuk idealisme adalah ideologi yang bertujuan memberikan informasi untuk memperkuat masyarakat (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013). Menurut Siregar, jurnalisme dan kegiatan jurnalistik mempunyai prinsip independensi dan netralitas yang harus dijaga. Kemerdekaan dalam arti berarti kebebasan mengamalkan ideologi jurnalistik. Sedangkan netral berarti seimbang, akurat, dan adil, kecuali untuk kepentingan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, Siregar menegaskan bahwa independensi dan netralitas tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika ingin menjadi media yang hebat, perlu menerapkan prinsip ini.

Untuk itu, KEJ yang diadopsi Dewan Pers terangkum dengan baik sebagai berikut: Penafsirannya sangat jelas: “Wartawan Indonesia bertindak independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak mempunyai niat jahat.” Prinsip independensi dan netralitas harus dilaksanakan (Pasal 1) sebut harus didukung oleh industri media massa (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013).

Kode Etik merupakan pedoman yang berorientasi pada praktik. Siregar (1996) menyatakan bahwa kode etik merupakan suatu rumusan yang tidak ada artinya jika esensinya tidak diwujudkan dalam konteks yang bersumber di luar kode etik itu sendiri. Dengan kata lain, teks kode etik dikaji tidak hanya dari pemahaman maknanya saja, namun juga ditinjau dari aspek eksternal kode etik itu sendiri, yaitu keberadaan profesi/kelompok yang menerapkan kode etik dalam lingkungannya. lingkungan yang lebih besar. Hal ini juga dianalisis dengan mempertimbangkan konteksnya. Menurut Siregar (1996), kode etik mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.

Ciri-ciri internal mengkondisikan hubungan antar anggota untuk memperluas kelompok, dan ciri-ciri eksternal mengkondisikan hubungan kelompok dengan masyarakat yang lebih luas. Agar dapat berfungsi dengan baik, (Bertens, 2000: 282) memberlakukan beberapa persyaratan pada kode etik. Pertama, kode etik harus merupakan hasil pengaturan diri profesional.

Adanya kode etik jelas menunjukkan bahwa profesi itu sendiri bertujuan untuk menghayati nilai-nilai moral yang dianggap penting, dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Kedua, penerapan Kode Etik harus terus dipantau agar dapat berfungsi secara optimal. Kasus pelanggaran akan dievaluasi dan ditangani oleh Dewan Kehormatan atau komite yang dibentuk khusus untuk tujuan ini. Kode etik pada dasarnya adalah aturan dan pedoman perilaku yang bersifat membatasi yang memastikan bahwa perilaku satu pihak konsisten dengan harapan pihak lain mengenai integrasi sosial.

Menurut Frankel, penciptaan kode etik memiliki beberapa tujuan (Seeger, 1997: 192). Pertama, merupakan pedoman moral yang jelas bagi para anggota organisasi profesi itu sendiri, dan kedua, merupakan dokumen hukum yang mengatur perilaku para anggota organisasi. Ketiga, kode etik melindungi anggota dari kejahatan dan penipuan. Keempat, struktur legitimasi, yang dapat menunjukkan bagaimana suatu organisasi berfungsi dan apakah organisasi tersebut mematuhi norma-norma sosial.

Munculnya kode etik jurnalistik sekitar abad ke-20, ketika muncul konsep tanggung jawab sosial sebagai respon terhadap kebebasan pers. Di sisi lain, Kode Etik Jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan

seperangkat etika jurnalis profesional. Dalam arti luas, kode etik di atas merupakan kode etik yang disepakati oleh organisasi jurnalis dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik mencakup perlindungan privasi masyarakat. Jurnalis tidak menerima suap, jangan memberikan informasi yang menyesatkan, hormatilah asas praduga tak bersalah dan harap menghindari pelaporan yang dapat menimbulkan keluhan. Permasalahan yang timbul akibat pelanggaran Kode Etik diselesaikan oleh Dewan Kode Etik organisasi profesi itu sendiri dan diawasi oleh Dewan Pers (Sulistiyowati, F. 2013).

### **2.12 Strategi Redaksi Dalam Menjaga Netralitas Pemberitaan**

Objektivitas merupakan salah satu prinsip media massa dalam menghasilkan berita. Nasution (2015) menyebutkan ada delapan prinsip yang harus dipenuhi dalam produksi berita. Hal tersebut adalah akurasi, independensi, objektivitas, keseimbangan, ketidakberpihakan, ketidakberpihakan, penghormatan terhadap privasi, dan akuntabilitas kepada publik. Jurnalis harus menerapkan prinsip ini. Karena itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepercayaan. Apalagi Nasution (2015) menyatakan objektivitas dan keseimbangan tidak dapat dipisahkan dalam penulisan berita.

Prinsip objektivitas bertujuan untuk mencegah kemungkinan atau kecenderungan jurnalis terpengaruh oleh subjektivitas pribadi atau pihak lain ketika melihat dan menggambarkan peristiwa dan peristiwa. Prinsip bertujuan untuk memastikan bahwa jurnalis melihat setiap isu dari sudut pandang yang berbeda sehingga mencerminkan kebenaran. Menurut Hirst dan Patching (2005), objektivitas dan keseimbangan dalam kegiatan jurnalistik bertujuan untuk



memastikan bahwa berita yang dihasilkan menyajikan fakta yang sebenarnya dan menghindari bias. Kedua hal ini sangat berguna, terutama ketika media massa memberitakan konflik dan perselisihan politik. Objektivitas dan keseimbangan membuat fakta berita terkesan berada pada zona “netral” antara dua pendapat yang berbeda atau dua kubu yang bersaing.

Dalam (Muhammad Gafar Yoedtadi, 2017: 276) keberpihakan pada salah satu calon dalam pemilu, akan menempatkan media pada kategori media partisan. (McQuails, 2000) menyatakan bahwa keberpihakan pada media menurunkan kualitas informasi yang dihasilkan dan media yang dikenal masyarakat sebagai media partisan akan kehilangan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan Hirst dan Patching (2005) yang menyatakan bahwa media massa adalah institusi sosial dan oleh karena itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Kovach dan Rosentiel (2006) merumuskan sembilan elemen jurnalisme untuk mengingatkan kita akan peran dan fungsi jurnalisme dalam masyarakat. Pada unsur yang kedua, Kovach dan Rosentiel merumuskan posisi jurnalisme terhadap warga negara, yang menurutnya kesetiaan jurnalisme terutama kepada rakyat. Artinya jurnalisme tidak boleh mengutamakan kelompok, golongan, etnis, pembaca, atau khalayak mana pun.

Selain itu, objektivitas muncul pada elemen keempat. Kovach dan Rosentiel (2006) menyatakan bahwa jurnalis harus independen terhadap pihak yang diberitakannya. Kemandirian di sini tidak hanya mencakup kemandirian pemikiran, golongan, dan status ekonomi, namun juga kemandirian ras, suku, agama, dan

gender. Ini berarti jurnalis harus menyerahkan segala yang mereka punya untuk membuat berita. Tugasnya adalah menyajikan fakta tentang apa itu . Se jauh mana jurnalis dapat mencapai objektivitas pemberitaan? Nurudin (2009) menyatakan bahwa fakta yang dilihat dan diberitakan jurnalis di media massa juga merupakan objektivitas yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi jurnalis dan media tempatnya bekerja.

Jurnalis pada akhirnya mengkonstruksi realitas yang mereka lihat. Dengan kata lain, objektivitas yang ditanamkan pada jurnalis bergantung pada konstruksi pemikiran bahwa ada dalam diri jurnalis. Oleh karena itu, objektivitas media massa dipengaruhi oleh banyak hal sehingga bersifat subjektif. Artinya, objek tersebut sebenarnya ada, namun merupakan campuran dari konstruksi mental dan institusi media. Oleh karena itu, tidak lepas dari subjektivitas. Hal ini pula yang menyebabkan fakta yang sama di bidang ini ditulis berbeda di setiap media.

### **2.13 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Strategi Redaksi**

Menurut Effendi (1993: 300), strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, strategi dijadikan sebagai peta jalan yang tidak hanya memberikan arahan tetapi juga menunjukkan harus berhasil. Apa itu strategi operasional? Menurut Liliweri (2011: 240), strategi merupakan salah satu kunci terpenting bagi suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya serta bertahan dalam ketatnya persaingan dunia bisnis.

Kata “strategi” berasal dari kata Yunani “stratogos”, yang secara harafiah berarti “seni total”. Belakangan, istilah tersebut berubah menjadi kata sifat

"strategia", yang berarti keahlian militer, dan baru-baru ini beradaptasi lagi dengan lingkungan bisnis modern.

Menurut Hitt (2001: 12), strategi redaksi adalah metode yang digunakan media untuk mencapai tujuan akhirnya. Strategi yang digunakan oleh tim redaksi adalah rencana yang menghubungkan seluruh bagian perusahaan, menyeluruh, mencakup seluruh elemen penting perusahaan, dan seluruh bagian rencana tersebut terintegrasi secara harmonis satu sama lain. Perencana strategis biasanya memegang posisi tertinggi di perusahaan karena mereka fokus pada keterampilan konseptual daripada keterampilan teknis.

Oleh karena itu, strategi redaksi mengembangkan berita dalam struktur editorial dan mencapai tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang yang bertugas menyajikan berita untuk mempromosikan persaingan ketat yang tercipta antara media lain. Ide-ide para pemimpin dan ide-ide yang dilakukan oleh semua orang di dalamnya mampu membuat massa tetap bertahan.

Wacana tentang TV publik di Indonesia menemukan konteksnya sejak lahirnya RUU Penyiaran Usul Inisiatif DPR, Juni 2000. Pada akhirnya eksistensi lembaga penyiaran publik memperoleh payung hukum dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (pasal 13 ayat 2, huruf a). Menurut pasal 14 ayat (1), "Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat," jabaran lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip lembaga penyiaran publik sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran No. 32

mesti dicari dan dirumuskan berdasarkan acuan yang ada termasuk mengenai format lembaga penyiaran publik yang berlaku di berbagai negara demokratis (A. Darmanto, 2004:93).

Ada sejumlah prinsip yang menjadi ciri atau ciri penyiaran publik, yakni:

- a. Kebebasan Berekspresi.
- b. Terjaminnya hak kepemilikan ganda
- c. Adanya keberagaman informasi yang diperuntukkan bagi publik  
(*diversity of information available to public*)
- d. Adanya keberagaman selera dan kepentingan kamu perlu.
- e. Akses terhadap beragam kelompok sosial dan budaya, termasuk kelompok minoritas.
- f. Kemampuan media untuk menjangkau seluruh wilayah di negara ini.
- g. Penjaminan mutu konten media yang diberikan kepada publik.
- h. Mendorong terciptanya lembaga politik yang demokratis dengan mengutamakan prinsip keseimbangan, ketidakberpihakan, dan independensi.
- i. Penghormatan terhadap privasi dan hak asasi manusia secara umum.
- j. Akses masyarakat dalam penyiapan dan pemantauan program persampahan (Brugger, David, 2001).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

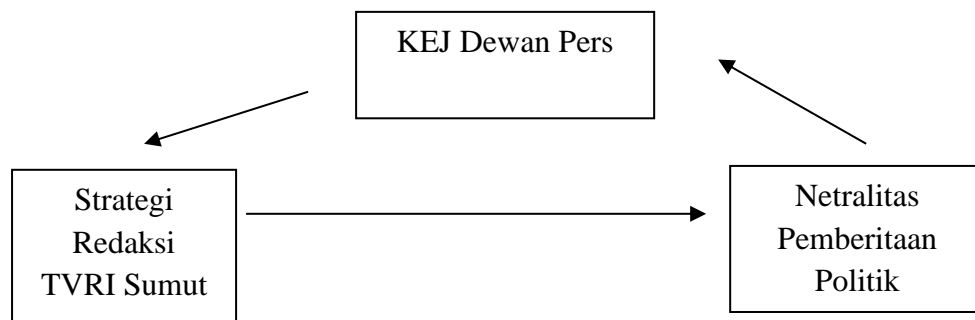
Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi untuk tujuan atau penggunaan tertentu. Jadi ada empat kata kunci yang perlu dipertimbangkan. Yaitu metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2017: 2).

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas situasi dan permasalahan yang disebutkan dan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan penelitian (Sugiyono, 2017: 02). Menurut Moleong (2017: 6), penelitian kualitatif mengkaji fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, tindakan, dan persepsi, dengan bantuan deskripsi formal kata-kata dan bahasa dalam konteks alam tertentu pemahaman yang komprehensif dan gunakan metode alami.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2019: 95) dalam buku Riset Bisnis, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menjelaskan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai unsur yang diidentifikasi sebagai permasalahan penting. Kerangka konseptual perlu ditetapkan ketika membahas dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian seperti:



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep Hasil Olahan Penulis (2024)**

### 3.3 Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep mempunyai arti: Pemahaman terhadap sesuatu, gambaran mental, proses, pendapat (pemahaman), rencana yang telah dipertimbangkan (cita-cita). Pengertian konsep menurut penelitian ini didasarkan pada kerangka konseptual yang penulis olah sebagai berikut:

- a. KEJ Dewan Pers: KEJ yang diadopsi Dewan Pers terangkum dengan baik sebagai berikut: Penafsirannya sangat jelas: “Wartawan Indonesia bertindak independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak mempunyai niat jahat.” Prinsip independensi dan netralitas harus dilaksanakan (Pasal 1) sebut harus didukung oleh industri media massa (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013).
- b. Strategi Redaksi TVRI Sumut: Strategi yang digunakan oleh tim redaksi adalah rencana yang menghubungkan seluruh bagian perusahaan, menyeluruh, mencakup seluruh elemen penting perusahaan, dan seluruh bagian rencana tersebut terintegrasi secara harmonis satu sama lain.

- c. Netralitas Pemberitaan Politik: Jurnalisme dan kegiatan jurnalistik mempunyai prinsip independensi dan netralitas yang harus dijaga. Kemerdekaan dalam arti berarti kebebasan mengamalkan ideologi jurnalistik. Sedangkan netral berarti seimbang, akurat, dan adil, kecuali untuk kepentingan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, Siregar menegaskan bahwa independensi dan netralitas tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika ingin menjadi media yang hebat, perlu menerapkan prinsip ini.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Strategi Redaksi TVRI Sumatera Utara	1. Berita Politik 2. Pengemasan 3. Penyuntingan
2.	Netralitas Pemberitaan Pemilu 2024	1. KEJ Dewan Pers 2. Tanggung jawab publik 3. Jujur, akurat, berimbang, objektif 4. Independen 5. Intervensi pemerintah

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian Hasil Olahan Peneliti 2024**

### 3.5 Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Tim Pengendali dan Perencanaan Pemberitaan TVRI Sumut Rifhandi Rusli, Kontributor TVRI Sumut penulis sendiri, dan Pengamat Media Massa Drs.Muhammad Syahril yang juga merupakan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Sumatera Utara.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi. Tanpa pengetahuan mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini oleh Sagiyono, Sutrisno Hadi, Lincoln, Guba adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab untuk memberi makna pada suatu topik tertentu. Melalui wawancara kita ingin mengetahui lebih tepat tema apa yang ingin diteliti oleh responden (Sugiyono, 2019: 195).

b. Observasi

Observasi Menurut Sutrisno Hadi (Sushiyono, 2019: 203), observasi adalah suatu proses kompleks yang terdiri dari proses biologis dan psikologis, yang terpenting adalah proses observasi dan memori. Menurut Lincoln dan Guba, Ruslan (2018, 33-34), ada tiga klasifikasi observasi. Artinya, pertama



peneliti berperan sebagai partisipan atau non partisipan. Kedua, observasi publik atau tersembunyi. Ketiga, tentu saja mengamati.

### **3.7 Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah strategi redaksi dalam mempertahankan netralitas pemberitaan pemilu 2024.

#### **b. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Kepala Tim Pengendalian dan Perencanaan Pemberitaan TVRI Sumut, Kontributor, dan Pakar Media Massa.

### **3.8 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah oleh Sugiyono, Sutrisno Hadi, Lincoln dan Guba sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang dimana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab untuk memberi makna pada topik tertentu. Melalui wawancara, kami ingin mengetahui secara lebih tepat topic apa yang ingin digali responden (Sugiyono, 2019:195).

## b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2019:203) observasi adalah proses kompleks yang terdiri dari proses biologis dan psikologis, yang terpenting diantaranya adalah proses pengamatan dan ingatan). Menurut Lincoln dan Guba, Ruslan (2018, 33-34) memiliki tiga klasifikasi pengamatan yaitu: pertama peneliti bertindak sebagai partisipan atau non partisipan, kedua observasi terbuka atau tersembunyi, ketiga observasi tentunya dengan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur.

### **3.9 Teknik Analisis Data**

Analisis data juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengubah data yang diperoleh dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data menurut Sugiyono (2017:245-252), sebagai berikut:

- a. Reduksi data: Reduksi data berarti meringkas, menetapkan prioritas, memfokuskan pada yang hakiki, mencari tema dan pola. Reduksi data dapat didukung pada perangkat elektronik seperti laptop dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- b. Visualisasi data: Informasi disajikan dalam bentuk deskripsi singkat grafik, hubungan antar kelas, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, materi paling sering disajikan dalam teks naratif.
- c. Desain akhir: Kesimpulan pertama yang disajikan adalah awal dan akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan

data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, dan ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang masuk akal.

### **3.10 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Waktu penelitian diperkirakan dimulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini adalah Kantor TVRI Sumatera Utara yang berada di Jalan Putri Hijau, Kota Medan.

### **3.11 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

Strategi Redaksi TVRI Sumut dalam mempertahankan netralitas pemberitaan pemilu 2024 menjadi objek penelitian sebab TVRI Sumut sebagai lembaga penyiaran publik tentu memiliki kewajiban dalam menjaga netralitas pemberitaan terkait politik seperti Pemilu 2024 yang tidak menampilkan diri berpihak kepada partai maupun pasangan calon tertentu. Guna menerapkan netralitas pemberitaan tersebut tentu diperlukan strategi yang berwujud kerjasama antara redaksi yang diisi oleh para editor dan kontributor di lapangan. Prinsip netralitas tersebut juga ditunjukkan oleh TVRI Sumut dengan memperbanyak pemberitaan yang lebih mengedepankan proses penyelenggaraan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam proses Pemilu 2024 seperti dari mulai persiapan hingga tahapan-tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, aturan-aturan seperti peraturan Komisi Penyiaran Indonesia hingga Kode Etik Jurnalistik menjadi fokus utama aturan yang menjadi harus ditaati oleh TVRI Sumut sebagai lembaga

penyiaran publik yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan dari penelitian yang saya lakukan bagaimana Strategi Redaksi TVRI Sumut Dalam Mempertahankan Netralitas Pemberitaan Pemilu 2024, adapun hasil penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1 Tahap Perencanaan Liputan**

Guna menjunjung tinggi sikap netralitas pemberitaan dalam konteks Pemilu 2024 sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Utara melakukan berbagai persiapan sebelum melakukan peliputan Pemilu 2024. Rapat koordinasi antara tim redaksi yang dipimpin oleh Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian Produksi & Penyiaran Berita, Rifhandi Rusli dengan para Kontributor di seluruh Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan secara daring menekankan bahwa dalam praktiknya di lapangan para Kontributor harus mengutamakan sikap netralitas dalam pemberitaan. Dalam Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari 2024, pada tahapannya para Kontributor ditekankan untuk lebih memfokuskan peliputan dalam aspek tahapan yakni yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota serta pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota.

Kontributor yang bertugas melakukan peliputan di lapangan dilarang untuk mengambil liputan partai politik atau calon legislatif tertentu saja seperti deklarasi ataupun kampanye. Jika peliputan terhadap partai politik atau calon legislatif maka harus dilakukan secara berimbang dan dilarang hanya dari sudut pandang partai

politik atau calon legislatif tertentu saja, dan juga harus menyertakan pendapat atau komentar dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Namun, hal ini dikecualikan bagi para Kontributor yang melakukan peliputan kampanye para pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebab jadwal kampanye para Capres-Cawapres di daerah tentu tak selalu bersamaan di waktu yang sama. Hanya saja prinsipnya ketiga paslon Capres-Cawapres yang melakukan kampanye di Provinsi Sumut wajib dilakukan peliputan tanpa terkecuali sebagai wujud praktik keberimbangan dan netralitas TVRI Sumut dalam pemberitaan politik.

#### **4.1.2 Peraturan Tentang Netralitas Pemberitaan Pemilu TVRI**

##### **a. *Editorial Policy TVRI***

Sesuai dengan instruksi *Editorial Policy* LPP TVRI yang juga wajib dipatuhi oleh seluruh Stasiun TVRI di daerah, bahwa ada beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi redaksi terkait dengan siaran Pemilu 2024, yakni:

- a. Independen: Siaran pemilu TVRI bebas dari segala bentuk tekanan partai politik, tekanan komersial, individu, kelompok, atau golongan tertentu.
- b. Tidak memihak: siaran pemilu TVRI tidak memihak pada individu, kelompok, atau golongan tertentu dan mengutamakan integrasi bangsa dan negara melalui semangat kebangsaan dan kerukunan hidup bermasyarakat.
- c. Pedoman redaksional: Siaran pemilu TVRI tunduk dan bersandar pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, merujuk pada peraturan KPU, merujuk pada peraturan KPI, dan merujuk pada *Editorial Policy* TVRI.

- d. Standar siaran Pemilu: Materi siaran pemilu harus aktual dan disiarkan pada kesempatan pertama dengan prinsip *first in first out*. Konten siaran pemilu harus akurat, tidak memihak, dan berdasarkan fakta disampaikan dengan lugas.
- e. Menjadi rujukan publik: Siaran pemilu TVRI harus menjadi rujukan atau referensi publik dan siaran iklan pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Tidak memprovokasi: Siaran pemilu TVRI tidak memprovokasi, menjajakan sensasi, dan merusak sendi nilai dan norma masyarakat. Siaran pemilu TVRI harus bebas dari tekanan politik, tekanan finansial, agar netralitas dan kemandiriannya tetap terjaga.
- g. Objektif dan *fairness*: Siaran pemilu TVRI mengacu pada kebenaran dan mengedepankan *objectivity and fairness* dan mengacu pada kaidah dasar jurnalistik serta fakta tidak dikaburkan dengan opini.
- h.

**b. Rekomendasi rapat koordinasi bedah program Pemilu 2024 “Pilihan Rakyat”**

Rapat koordinasi bedah program Pemilu 2024 TVRI dilakukan antara TVRI pusat dengan setiap perwakilan stasiun TVRI daerah yang diwakili oleh Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian Produksi & Penyiaran Berita setiap stasiun daerah

termasuk TVRI Sumatera Utara. Rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Siaran berita pemilu TVRI merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Siaran berita pemilu TVRI dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.
3. Siaran berita pemilu TVRI mengedepankan asas keberimbangan, pemerataan, proporsional dan menghindari politik identitas.
4. Siaran berita pemilu TVRI harus akurat, independen, dan netral.
5. Siaran berita pemilu TVRI 2024 mendorong partisipasi masyarakat.
6. Siaran berita pemilu TVRI mengakomodir pemilih pemula dalam pemilu 2024.
7. Siaran berita pemilu TVRI melibatkan seluruh stasiun daerah dalam menyukseskan tahapan pemilu.
8. Siaran berita pemilu TVRI tidak dibebankan biaya produksi.
9. Sosialisasi pemilu dalam siaran buletin berita yang bersifat pendidikan politik serta kegiatan partai politik, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pengembangan usaha.
10. Berkaitan dengan konten dan durasi siaran berita pemilu, pengembangan usaha berkoordinasi dengan program dan berita.

**c. Kode etik jurnalistik yang mengatur tentang netralitas pemberitaan.**

Selain peraturan internal TVRI yang mengharuskan sikap netralitas redaksi dalam pemberitaan pemilu 2024. Secara umum netralitas media



massa juga diatur dalam kode etik jurnalistik. Dalam jurnalisme, termasuk idealisme ada ideologi yang bertujuan memberikan informasi untuk memperkuat masyarakat (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013). Menurut Siregar, jurnalisme dan kegiatan jurnalistik mempunyai prinsip independensi dan netralitas yang harus dijaga. Kemerdekaan dalam arti berarti kebebasan mengamalkan ideologi jurnalistik. Sedangkan netral berarti seimbang, akurat, dan adil, kecuali untuk kepentingan umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Siregar menegaskan bahwa independensi dan netralitas tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika ingin menjadi media yang hebat, perlu menerapkan prinsip ini.

Untuk itu, KEJ yang diadopsi Dewan Pers terangkum dengan baik sebagai berikut: Penafsirannya sangat jelas: “Wartawan Indonesia bertindak independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak mempunyai niat jahat.” Prinsip independensi dan netralitas harus dilaksanakan (Pasal 1) sebut harus didukung oleh industri media massa (Siregar, Kompas, 21 Juli 2013).

Kode Etik merupakan pedoman yang berorientasi pada praktik. Siregar (1996) menyatakan bahwa kode etik merupakan suatu rumusan yang tidak ada artinya jika esensinya tidak diwujudkan dalam konteks yang bersumber di luar kode etik itu sendiri. Dengan kata lain, teks kode etik dikaji tidak hanya dari pemahaman maknanya saja, namun juga ditinjau dari aspek eksternal kode etik itu sendiri, yaitu keberadaan profesi/kelompok

yang menerapkan kode etik dalam lingkungannya. lingkungan yang lebih besar. Hal ini juga dianalisis dengan mempertimbangkan konteksnya. Menurut Siregar (1996), kode etik mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Kode etik jurnalistik merupakan suatu aturan yang mengikat yang seharusnya memang dijunjung tinggi oleh individu wartawan. Sebab kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik akan memiliki implikasi terhadap produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan dan tentunya berdampak pada opini publik akibat dari produk jurnalistik tersebut.

#### **4.1.3 Strategi Redaksi TVRI Sumut Dalam Mempertahankan Netralitas Pemberitaan**

Untuk mengulas lebih dalam terkait dengan seperti apa strategi yang diterapkan oleh TVRI Sumut dalam mempertahankan netralitas pemberitaan Pemilu 2024, penulis mewawancarai Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian Produksi & Penyiaran Berita TVRI Sumut, Rifhandi Rusli. Dirinya menjelaskan bahwa TVRI Sumut sebagai lembaga penyiaran pemerintah tentu harus mematuhi segala aturan terkait dengan netralitas. Kendati sebagai lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, TVRI Sumut tetap mengutamakan kepentingan publik sebagai prinsip utama dalam konteks pemberitaan.

Intervensi pemerintah tentu sangat besar sebab TVRI sebagai lembaga pemerintah. Namun intervensi pemerintah yang dimaksud merupakan TVRI harus mengutamakan kepentingan publik dan dilarang berpihak kepada siapapun dan

apapun dalam pemberitaan apalagi pemberitaan yang terkait dengan politik. Rifhandi menjelaskan dalam menjaga netralitas pemberitaan pada Pemilu 2024, redaksi TVRI Sumut telah melakukan berbagai tahapan seperti rapat rutin dan rapat khusus dengan para kontributor di lapangan agar pemahaman tentang netralitas pemberitaan pemilu 2024 dapat dipahami secara menyeluruh.

Redaksi TVRI Sumut telah melakukan rapat-rapat persiapan peliputan Pemilu 2024 bahkan sejak awal tahun 2023 yang melibatkan seluruh kontributor di Sumatera Utara. Rapat yang dilakukan oleh para kontributor di luar daerah yakni secara daring dan langsung bagi para kontributor yang berada di Kota Medan. Dalam beberapa kali rapat tersebut ditekankan bahwa pemberitaan TVRI Sumut pada Pemilu 2024 lebih intensif pada sudut pandang tahapan dan mengutamakan narasumber yakni penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah dan lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Pemilu Daerah. Selain itu lembaga-lembaga pemerintah lain yang dianggap berperan dalam menyukseskan tahapan Pemilu 2024 seperti Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung-jawab terkait keamanan.

Para kontributor di lapangan ditekankan untuk lebih mengutamakan pengambilan sudut pandang berita atau *angle* berita dengan muatan narasumber para lembaga tersebut. Redaksi TVRI Sumut berulang kali mengingatkan bahwa jika pun mengambil sudut pandang pemberitaan terkait dengan partai politik, sebisa mungkin tak hanya pada satu atau dua partai politik dan sudut pandang lembaga penyelenggara pemilu harus tetap ada. Contohnya adalah pada tahapan pendaftaran sebagai peserta pemilu bagi partai politik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Utara yang peliputannya dilakukan oleh penulis sendiri, tetap harus menyertakan komentar dari para Komisioner KPU Sumut dan tak hanya dari pimpinan partai politik yang melakukan pendaftaran.

Selain itu, pada tahapan Pemilu 2024 TVRI Sumut juga berperan sebagai pengawas yang mengutamakan kepentingan publik seperti meminta tanggapan Bawaslu Daerah terkait dengan alat-alat peraga kampanye seperti bendera, spanduk, dan lainnya yang masih terpasang di beberapa lokasi yang telah dilarang. Pemberitaan terkait alat-alat peraga kampanye yang terpasang di lokasi yang dilarang dan memunculkan tanggapan dari lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu merupakan wujud dari TVRI Sumut yang berperan sebagai “mata” publik. Rifhandi Rusli menyebut hal ini dilakukan juga sebagai upaya mengedukasi publik bahwa terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye yang tentu tidak semua orang mengetahui terkait peraturan tersebut.

Rifhandi mengatakan meskipun dalam pelaksanaan liputan Pemilu 2024, hal yang telah berulang kali dipaparkan dan ditekankan redaksi TVRI Sumut kepada para Kontributor tak semuanya memahami dan masih saja terdapat beberapa kali pelanggaran seperti hanya melakukan peliputan terhadap salah satu Calon Legislatif ataupun partai politik tertentu tanpa sudut pandang penyelenggara pemilu. Dalam beberapa kali hal ini terjadi, maka redaksi TVRI Sumut mengambil langkah tegas dengan tidak menayangkan berita yang dikirim oleh Kontributor tersebut. Hal ini beberapa kali pernah terjadi, terutama dilakukan oleh para Kontributor daerah selain Kota Medan. Namun redaksi TVRI Sumut selalu mengambil langkah dengan tidak menayangkan berita tersebut.

#### **4.1.4 Pemberitaan TVRI Sumut berfokus pada tahapan dan penyelenggara**

Penulis yang juga berperan sebagai Kontributor di TVRI Sumut juga mengalami seperti apa perhatian dan ketegasan redaksi TVRI Sumut terkait dengan netralitas pemberitaan Pemilu 2024. Penulis yang juga memiliki wilayah liputan pemberitaan di Komisi Pemilihan Umum Sumut tentu mengalami secara langsung berbagai tahapan dalam Pemilu 2024 mulai dari pendaftaran partai politik dan Calon Legislatif DPRD Sumut hingga tahapan verifikasi berkas sampai akhirnya pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024 lalu.

Sebelumnya redaksi TVRI Sumut memang telah berulang kali menggelar rapat secara daring maupun luring kepada para Kontributor guna memaparkan berbagai aturan terkait dengan keharusan netralitas TVRI Sumut sebagai lembaga penyiaran negara dalam pemberitaan politik yang dalam hal ini yakni Pemilu 2024. Penulis melakukan peliputan sejak awal partai politik mendaftarkan para Calon Legislatifnya ke KPU Sumut yang dimulai dari hari pertama pendaftaran yakni bulan Mei 2023 lalu. Kendati partai politik melakukan pendaftaran tidak semua pada hari yang sama, namun sesuai dengan anjuran redaksi TVRI Sumut bahwa pada setiap peliputan pendaftaran partai politik lebih diutamakan mengambil sudut pandang lembaga penyelenggara yakni KPU Sumut dengan narasumber ketua ataupun para komisioner KPU Sumut. Hal ini dilakukan redaksi TVRI Sumut sebagai strategi dalam menjaga netralitas pemberitaan. Dalam pelaksanaannya, penulis lebih mengambil sudut pandang KPU Sumut sebagai lembaga penyelenggara dan menjadikan ketua ataupun komisiner KPU Sumut sebagai narasumber daripada menjadikan pimpinan partai politik yang mendaftar sebagai

narasumber. Sebab akan menjadi rentan bertolak belakang dengan strategi netralitas pemberitaan Pemilu 2024 yang diterapkan oleh redaksi TVRI Sumut jika menjadikan pimpinan partai politik sebagai narasumber sementara tidak semua partai politik melakukan pendaftaran di hari yang sama.

Hal yang sama juga berlaku saat peliputan Pilpres 2024. Namun, redaksi TVRI Sumut menerapkan pengecualian dalam konteks kampanye pada hal ini. Sebab jadwal kampanye pasangan Capres-Cawapres saat itu memiliki perbedaan waktu. Dalam hal ini, redaksi TVRI Sumut menerapkan strategi dengan mengakomodir setiap agenda kampanye Capres-Cawapres di Sumatera Utara. Dalam menjaga netralitas pemberitaan, redaksi TVRI Sumut menerapkan durasi yang sama dalam penayangan berita kampanye hingga tetap mengikuti jadwal kampanye dan melakukan peliputan dan menayangkannya.

Tak hanya itu, penulis juga mengalami bahwa dalam menjaga netralitas pemberitaan Pilpres 2024, dalam pelaksanaan nonton bareng debat Capres-Cawapres yang dilakukan di setiap rumah pemenangan paslon Capres-Cawapres di Kota Medan, tiga Kontributor Kota Medan selalu disebar di masing-masing rumah pemenangan untuk melakukan peliputan dan suasana nonton bareng debat Capres-Cawapres di setiap lokasi rumah pemenangan paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 juga ditayangkan secara bersamaan. Dalam pengalaman penulis selama melakukan peliputan pemilu 2024, redaksi TVRI Sumut sangat tidak menolerir jika terdapat indikasi yang bertolak belakang dengan prinsip netralitas dan tidak berpihak pada partai politik, calon legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden atau siapapun yang bertindak sebagai peserta dalam Pemilu 2024. Redaksi

TVRI Sumut berfokus pada tahapan penyelenggaraan dan menjaga prinsip netralitas jika melakukan pemberitaan politik dengan memberi porsi yang sama dalam peliputan dan penayangan.

#### **4.1.5 Penilaian Netralitas TVRI Sumut Dalam Pemberitaan Pemilu 2024**

Netral dan Independen hamper selalu memunculkan perdebatan di publik. Dalam hal ini guna mendapatkan pandangan terhadap pemberitaan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh TVRI Sumut, penulis berhasil mewawancarai seorang Pengamat Media Massa yakni Drs. Muhammad Syahrir yang berpendapat bahwa netralitas dan independensi dalam konteks jurnalistik merupakan hal yang wajib dilakukan. Syahrir mengatakan dalam konteks jurnalistik bahwa netral harus dipahami sebagai sikap redaksi dan independen sebagai sikap individu wartawan.

Dirinya menyebut bahwa netral dengan orientasi tak berpihak dan memberikan porsi yang sama dalam melakukan peliputan dan menayangkan pemberitaan merupakan sebuah keharusan yang harus dijadikan sebuah prinsip redaksi media massa. Independen juga merupakan sikap yang harus dimiliki seorang wartawan. Individu wartawan tentu tidak boleh diintervensi dalam hal apapun dan oleh siapapun. Keberimbangan atau netralitas pemberitaan yang ditulis atau diliput oleh seorang wartawan akan seiring sejalan sebab individu wartawan juga terikat dengan kode etik yang mengharuskannya bersikap tak memihak dalam pemberitaan politik terkhusus Pemilu. Namun, sama seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), wartawan juga memiliki hak memilih saat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu. Artinya, menurut Syahrir secara individu wartawan dibolehkan berpihak sebab dirinya memiliki hak pilih. Namun keberpihakan itu tentu dilarang keras

untuk dituangkan dalam bentuk berita jika ia sedang melakukan tugas-tugas jurnalistiknya.

Syahrir yang juga merupakan komisioner Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sumatera Utara mengatakan itulah sebabnya pandangan terkait netral dan independen dalam konteks jurnalistik harus disikapi secara bijak. Redaksi media massa terlebih TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memang diharuskan untuk netral dan netralitas itu sudah tertuang dalam beberapa aturan yang telah disebutkan penulis di atas. Dalam hal netralitas TVRI Sumut di pemberitaan Pemilu 2024, Syahrir mengatakan secara garis besar TVRI Sumut telah memperlihatkan prinsip netralitasnya dengan berfokus lebih kepada tahapan dan penyelenggaraan dibanding partai politik dan peserta Pemilu 2024. Hal ini menurut Syahrir merupakan bentuk tanggung jawab TVRI Sumut sebagai lembaga penyiaran publik yang menempatkan kepentingan publik lebih di atas segalanya.

Hanya saja, dengan sikap prinsip yang demikian menurut Syahrir TVRI kerap menjadi stasiun televisi yang berada pada tingkat pemeringkatan (*rating*) yang relatif rendah dibanding stasiun-stasiun televisi swasta yang dalam pemberitaan politik banyak mengemukakan unsur-unsur yang sensasional. Keberhasilan stasiun TVRI Sumut dalam mempertahankan prinsip netralitas dalam pemberitaan politik praktis menurut Syahrir dibuktikan dengan tidak adanya teguran pelanggaran terkait dengan netralitas pemberitaan Pemilu 2024 yang dilayangkan oleh KPID Sumut maupun Bawaslu serta masyarakat yang melaporkan TVRI Sumut kepada dewan pengawas. Hal ini membuktikan bahwa publik telah merasa bahwa TVRI Sumut telah memainkan perannya sebagai lembaga penyiaran



publik yang tidak condong berpihak kepada partai politik maupun salah satu paslon saat Pilpres 2024 yang tentu rentan menghadirkan perpecahan di masyarakat.

Syahrir mengatakan, pertarungan *rating* yang dilakukan TVRI sebab menghindari pemberitaan yang mengandung unsur sensasional merupakan wujud dari slogannya yakni media pemersatu bangsa. Syahrir melihat bahwa perpecahan di tengah masyarakat juga tak jarang terjadi akibat dari pemberitaan media massa yang membentuk opini publik. Meski masih terdapat kekurangan dalam hal kualitas penyiaran dan lainnya, namun dalam konteks netralitas pemberitaan Pemilu 2024 Syahrir mengatakan TVRI Sumut telah berjalan sesuai dengan koridornya. Dirinya berharap hal ini agar dapat terus dipertahankan di tengah arus media massa yang mengedepankan pemberitaan sensasional. TVRI Sumut harus tetap berperan sebagai pemersatu dengan menghadirkan pemberitaan-pemberitaan yang memiliki nilai edukasi lebih dibanding media massa lainnya.

#### **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang penulis anggap ahli pada bidangnya yakni Ketua Tim Perencanaan dan Pengendalian Produksi & Penyiaran Berita TVRI Sumut, Rifhandi Rusli, Kontributor TVRI Sumut yakni penulis sendiri dan Pengamat Media Massa Drs. Muhammad Syahril penulis dapat menjelaskan secara terperinci permasalahan yang menjadi objek penelitian dan menerangkan secara keseluruhan strategi redaksi TVRI Sumut dalam mempertahankan netralitas pemberitaan Pemilu 2024.

Bahwa dalam menerapkan dan mewujudkan netralitas pemberitaan Pemilu

2024, redaksi TVRI Sumut berpedoman pada beberapa aturan seperti *Editorial Policy* TVRI pusat yang di dalamnya mengemukakan poin-poin yang menjunjung tinggi sikap netralitas pemberitaan saat Pemilu 2024 hingga kode etik jurnalistik bagi individu wartawan atau dalam hal ini Kontributor TVRI Sumut untuk selalu mengedepankan prinsip netralitas dalam melakukan peliputan dan memberitakan Pemilu 2024. Beberapa pedoman aturan tersebut pun disosialisasikan oleh redaksi TVRI Sumut kepada para Kontributor di seluruh wilayah Sumatera Utara agar memahami fokus dan hal-hal yang dilarang dalam peliputan dan pemberitaan Pemilu 2024.

Sosialisasi yang dilakukan lewat rapat secara daring maupun luring dengan para Kontributor di Sumatera Utara dilakukan redaksi TVRI Sumut sebagai strategi untuk menerapkan prinsip netralitas pada pemberitaan Pemilu 2024. Dalam rapat-rapat tersebut redaksi TVRI Sumut menekankan bahwa TVRI Sumut berfokus pada tahapan dan penyelenggaraan dalam pemberitaan Pemilu 2024 dan tidak berfokus pada peserta kontestasi politik tersebut yakni para calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik tertentu. Meski masih terdapat beberapa Kontributor yang melaporkan peliputan yang berfokus pada paslon maupun partai politik namun redaksi TVRI Sumut memberikan langkah tegas dengan tidak menyangkan hasil liputan tersebut. Sebagai Kontributor TVRI Sumut di Kota Medan, ketegasan redaksi dengan berulang kali dalam rapat menegaskan pedoman serta prinsip netralitas tersebut dinilai sebagai wujud keseriusan redaksi TVRI Sumut dalam menerapkan netralitas pemberitaan Pemilu 2024.

Hal ini juga mendapat penilaian dari pengamat media massa, Drs.

Muhammad Syahril yang juga merupakan komisioner KPID Sumut yang menilai bahwa selama kontestasi Pemilu 2024 pemberitaan TVRI Sumut jauh dari kesan sensasional dan menerapkan keberimbangan pemberitaan yang proporsional kepada peserta Pemilu 2024. Seperti pada pelaksanaan Pilpres 2024 TVRI Sumut memberikan porsi yang berimbang dalam pemberitaan kepada setiap paslon yang melakukan kampanye ke Sumatera Utara tanpa terkecuali. Juga melakukan peliputan dan menayangkan pemberitaan nonton bareng debat Capres-Cawapres di masing-masing rumah pemenangan dengan durasi dan waktu tayangan yang sama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah penelilitakukan diatas, maka dapat disimpulkan tentang bagaimana strategi redaksi TVRI Sumut dalam mempertahankan netralitas pemberitaan Pemilu 2024 yakni sebagai berikut:

1. Berpegang teguh terhadap berbagai aturan yang mengharuskan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk menjaga dan mempertahankan sikap netralitas pada pemberitaan Pemilu 2024 merupakan kunci agar terwujudnya pemberitaan yang tidak berpihak ke siapapun dan apapun terlebih peserta kontestasi politik Pemilu 2024.
2. Berbagai rapat secara rutin dilakukan oleh redaksi TVRI Sumut kepada para Kontributor yang bertugas dalam peliputan di lapangan sebagai upaya untuk mewujudkan pemahaman terhadap pedoman aturan dan fokus pemberitaan TVRI Sumut pada Pemilu 2024.
3. Memberikan porsi pemberitaan yang sama kepada peserta Pemilu 2024 dan lebih berfokus pada proses tahapan dan mengutamakan sudut pandang penyelenggara Pemilu yakni KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga pengawasan Pemilu yakni Bawaslu sebagai wujud strategi TVRI Sumut dalam menjaga netralitas pemberitaan Pemilu 2024.
4. Penilaian pengamat media massa terhadap keberhasilan TVRI Sumut dalam pemberitaan Pemilu 2024 dapat terlihat dari tidak adanya teguran terkait

dengan netralitas pemberitaan TVRI Sumut saat Pemilu 2024 yang datang dari KPID Sumut maupun lembaga pengawas Pemilu ataupun masyarakat yang merasa pemberitaan TVRI Sumut pada Pemilu 2024 tidak netral.

## **5.2 Saran**

Adapun beberapa saran yang penulis miliki dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, yakni sebagai lembaga penyiaran publik sudah sepatutnya TVRI Sumatera Utara mempertahankan prinsip netralitas dalam pemberitaan politik. Sebab jika prinsip netralitas dalam pemberitaan politik terus dijunjung tinggi oleh TVRI Sumut ini akan membuat publik merasa memiliki TVRI sepenuhnya sebagai media televisi yang kini dapat mewakili kepentingan publik pada setiap pemberitaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, dkk. 2019. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Harahap, Arifin Saleh. 2018. *Manajemen Pemberitaan Televisi*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Hernikawati, Dewi. 2017. *Komunikasi Kelompok Dan Upaya Pengembangannya (Kasus Pada Galeri Internet Bppki Jakarta Terkait Upaya Revisi Instrument Evaluasi Peserta)*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. 21(1). 83-95.
- Imron, M. 2017. *Analisis Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Program Televisi Muatan Lokal (Studi Kasus Pada Penyiaran Jtv Biro Kediri)*. Jurnal Revitalisasi. 6(2).
- Indrasari, Dr Meithiana. 2019. *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, Jawa Timur: Unitomo Press.
- Jatnika, Ajat. 2019. *Komunikasi Kelompok*. Bandung: Alfabeta.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi serba ada serba makna*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy, J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Morissan. 2018. *Manajemen Media Siaran*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Deddy. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nurudin. 2017. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2017. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silviani, Irene, dkk. 2021. *Manajemen Media Massa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

- Adawiyah, Cut R. 2017. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peran Komunikasi Kelompok Tani Dalam Adopsi Inovasi Teknologi Upaya Khusus (Padi, Jagung, Dan Kedelai) Di Jawa Timur*. Jurnal Agro Ekonomi. 35 (2). 151-170.
- Aprilinda Damanik, Sanny. 2018. *Komunikasi Kelompok Dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Team Redaksi Bidang Berita Lembaga Penyiaran Publik Tvri Sumatera Utara Di Medan*. Jurnal Prointegrita. 2(348). 1-272.
- Heriawan, Suryo. 2016. *Pola Komunikasi Kelompok Pada Komunitas Scooter "Vespa" Dalam Menjalin Hubungan Solidaritas*. Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Iskandar, Joni. Sudono Syueb. 2017. *Pengaruh Komunikasi Interpersonal Dan Komunikasi Kelompok Terhadap Kohesivitas Kelompok Pada Supporter Persebaya Korwil Suramadu*. Jurnal Ultimacomm. 9(2).
- Muliawan, Tulus. 2013. *Komunikasi Kelompok Suporter Bola Dalam Membentuk Kohesivitas (Studi Kasus Pada The Jakmania UNJ)*. Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Pujiastuti, Priliani Sri. Ika Junita Triwardhini. 2018. *Komunikasi Kelompok Tim Produksi dalam Menghasilkan Gagasan Kreatif Program The Comment NET TV*. Prosiding Manajemen Komunikasi. 4(1). 8-13.
- Santoso, Meilanny Budiarti. 2018. *Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Terbentuknya Kerjasama Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3l Di Lingkungan Universitas Padjadjaran*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. 5(2). 198-204.
- Sudarmawan, Wahyu. 2020. *Kualitas Acara Televisi: Peran Kepuasan Menonton Sebagai Mediator Pengaruh Terhadap Loyalitas Penonton*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Wahyono, Eko. 2018. *Komunikasi Kelompok (Studi Dialog Komunitas dalam Pengembangan Masyarakat di Perkotaan)*. Nyimak Journal of Communication. 2(2). 113-130.
- Yunita, Ria. 2018. *Komunikasi Kelompok Tim Kreatif Dalam Pengambilan Keputusan Pada Program INSERT PAGI di Trans TV*. Jurnal Komunikasi. 9(2). 2576-3292.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila ada masalah harap segera hubungi  
nomor dan alamat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/D/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Faks. (061) 6625474 - 6631003  
http://fkip.umcu.ac.id fkip@umcu.ac.id fkipumsumedan fkipumsumedan fkipumsumedan fkipumsumedan

Sk-1

PERMCHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi .....  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, .....20.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : M. Agung Safari Harahap  
NPM : 1703110017  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
SKS diperoleh : ..... SKS, IP Kumulatif .....

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi redaksi TVRI Sumut dalam mempertahankan netralitas Pemberitaan Pemilu 2024	✓ 20 Mar. 24
2	Analisis wacana narasi pemberitaan terkait unjuk rasa menolak dugaan kecurangan pemilu 2024 di KPU Sumut di waspada.co.id	
3	Analisis efektivitas standar operasional prosedur divisi redaksi dalam penulisan berita di lembaga pers mahasiswa Teropong UMSU	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalannya;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

139.17.311

Pemohon,

Medan, tanggal 20 Maret 2024

Ketua  
Program Studi.....

(.....)  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi.....

(Dr. Riant Pradi)  
NIDN: .....

NIDN: .....





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 527/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **20 Maret 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **M. AGUNG SAFARI HARAHAP**  
 N P M : 1703110017  
 Program Studi : Ilmu Komunikasi  
 Semester : XIV (Empat Belas) Tahun Akademik 2023/2024  
 Judul Skripsi : **STRATEGI REDAKSI TVRI SUMUT DALAM  
 MEMPERTAHANKAN NETRALITAS PEMBERITAAN PEMILU  
 2024**

Pembimbing : **Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.IKom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 139.17.311 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 20 Maret 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 10 Ramadhan 1445 H  
 20 Maret 2024 M

Dekan,

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



Kemahasiswaan  
 I. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
 di Medan



Dokumentasi











**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Faks. (061) 6625474 - 6631003  
Email: [info@fkip.umsumedan.ac.id](mailto:info@fkip.umsumedan.ac.id) [isip@umku.ac.id](mailto:isip@umku.ac.id) [umsumedan@umsumedan.ac.id](mailto:umsumedan@umsumedan.ac.id) [umsumedan@umsumedan.ac.id](mailto:umsumedan@umsumedan.ac.id) [umsumedan@umsumedan.ac.id](mailto:umsumedan@umsumedan.ac.id) [umsumedan@umsumedan.ac.id](mailto:umsumedan@umsumedan.ac.id)

Sk-1

**PERMICHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi .....  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, ..... 20.....

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : M. Agung Safari Harahap  
NPM : 1703110017  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
SKS diperoleh : .....SKS, IP Kumulatif .....

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi redaksi TVRI Sumut dalam mempertahankan Netralitas Pemberitaan Pemilu 2024	✓ 20 Mar. 24
2	Analisis wacana narasi pemberitaan terkait unjuk rasa menolak dugaan kecurangan pemilu 2024 di KPU Sumut di waspada.co.id	
3	Analisis efektivitas standar operasional prosedur divisi redaksi dalam penulisan berita di lembaga pers mahasiswa Teropong UMSU	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

139.17.311

Pemohon,

Medan, tanggal 20 Maret 2024  
Ketua  
Program Studi.....

(.....)  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi.....

(.....)  
NIDN:

(Dr. Riant Priadi)  
NIDN:





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi bukti in eppr dilakukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KR/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 527/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 20 Maret 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **M. AGUNG SAFARI HARAHAP**  
N P M : 1703110017  
Program Studi : **Ilmu Komunikasi**  
Semester : **XIV (Empat Belas) Tahun Akademik 2023/2024**  
Judul Skripsi : **STRATEGI REDAKSI TVRI SUMUT DALAM  
MEMPERTAHANKAN NETRALITAS PEMBERITAAN PEMILU  
2024**

Pembimbing : **Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.LKom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 139.17.311 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 20 Maret 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 10 Ramadhan 1445 H  
20 Maret 2024 M



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.

Dekan  
  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402







**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dia menjawab surat ya agar disubukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631663

Website: <https://fisp.umsu.ac.id> Email: [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) Instagram: @umsuMEDAN Facebook: umsmedan Twitter: umsmedan

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 25 Juli 2024

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : M. Agung Safari Harahap  
N P M : 1703110017  
Program Studi : Ilmu komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 624/SK/IL.S.AU/UMSU-03/F/20.24 tanggal 10 Maret 2024 dengan judul sebagai berikut :

STRATEGI REDAKSI TVRI SUMATERA UTARA DALAM MENJAGA  
NETRALITAS PEMBERITAAN PEMILU 2024

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing .

Dr. Ribut Prjadi, S.Sos, M.Hum  
(.....)

NIDN:

Pemohon,

M. Agung Safari Harahap  
(.....)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 1292/JUND/II.3 AU/UMSU-03/F/2024



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berkarya

Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR PKOK MAHASISWA	PENANGGAP	FEMBIMING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	FATYA AZZAHRA	2003110135	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.	PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP SPROKRASITINIASI AKADEMIK MAHASISWA FMIPA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12	M. AGUNG SAFARI HARAHAP	1703110017	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	STRATEGI REDAKSI TVRI SUMUT DALAM MENFERTAHANKAN NETRALITAS PEMBERITAAN PEMILIH 2024
13	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	2003110222	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. M. HAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS MAKNA NON VERBAL PADA KARAKTER TOKOH UTAMA DALAM FILM DUNIA TANPA SUARA KARYA HANUNG BRAMANTIO
14	AUDREY FANNI LUBIS	2003110139	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS SEMIOTIKA PADA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA EDISI: PENCEGAHAN STUNTING MASYARAKAT 60 DETIK
15	RIDHO HASIBULLAH	2003110226	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	POLA KOMUNIKASI TUTOR DALAM PENGGUNAAN METODE BELAJAR UNIK SATU MURID SATU TUTOR DI LKP SAS ENGLISH LABORATORY







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-K/P/17/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fslp.umsu.ac.id Rslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : M. Agung Safari Harahap  
NPM : 1703110017  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Strategi Redaksi TVRI Sumut Dalam Memertahankan netralitas Pemberitaan di Pemilu 2024

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20 Mei 2024	Bimbingan proposal	
2.	31 Mei 2024	Bimbingan proposal	
3.	25 Juli 2024	Bimbingan proposal	
4.	29 Juli 2024	Seminar proposal	
3.	3 Agustus 2024	Bimbingan skripsi	
4.	15 Agustus 2024	Bimbingan skripsi	
5.	23 Agustus 2024	Bimbingan skripsi	
6.	31 Agustus 2024	sidang skripsi	

Medan, 20 Agustus 2024.

Dekan,  
  
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)  
NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,  
  
Arhyar Anshori, S.Sos. M.ka  
(.....)  
NIDN :

Pembimbing,  
  
(Dr. Ribut Priadi S.Sos. M.ka  
(.....)  
NIDN :



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : M. Agung Safari Harahap  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 20 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Pasar 3, Krakatau, Gang Bambu No.73  
Anak ke : 1

### **Data Orang Tua**

Ayah : Alm. Chairul Anwar Harahap  
Ibu : Pamuji Hariaty  
Alamat : Jalan Pasar 3, Krakatau, Gang Bambu No.73

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN 060870 Medan (2005-2011)
2. SMPN 11 Medan (2011-2013)
3. SMKN 1 Percut Sei Tuan (2013-2016)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2017-2024)